



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI PENELITI  
HAKIM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora**

**RISA ALDA H**

**0806465794**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN  
DEPOK  
JUNI 2012**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 15 Juni 2012



Risa Alda H

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Risa Alda H

**NPM** : 0806465794

**Tanda Tangan** :  .....

**Tanggal** : 15 Juni 2012 .....

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Risa Alda Hatriani  
NPM : 0806465794  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Judul Skripsi : Peran Perpustakaan Mahkamah Konstitusi  
dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Peneliti  
Hakim.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Taufik Asmiyanto M.Si

(*t. Atleiyans*)

Penguji : Dra. Luki Wijayanti SIP., M.Hum

(*Luki*)

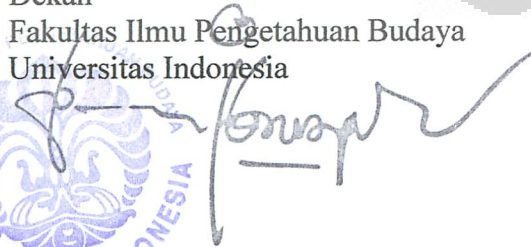
Penguji : Hanindyo S.Sos., M.Si

(*Hanindyo*)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 15 Juni 2012

Oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta, M.A.  
NIP. 196510231990031002

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah tidak berhenti penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah yang diakhiri dengan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora pada Program studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Penulis sangat menyadari tanpa dukungan banyak pihak, penulis tidak dapat menjalani perkuliahan dengan baik, sampai dengan penulisan skripsi ini, yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta semangat dari keluarga, dosen, khususnya dosen pembimbing, serta teman-teman yang memberikan dukungan moril maupun materi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang bersifat konservatif. Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Taufik Asmiyanto, sebagai pembimbing penulisan skripsi yang telah dengan sabar banyak memberikan masukan, kritik, dan saran serta semangat yang tiada henti diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Luki Wijayanti, sebagai ketua sidang, penguji dan pembimbing akademik yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bermanfaat untuk skripsi yang dikerjakan penulis. Serta membimbing penulis selama melaksanakan perkuliahan disela kesibukan beliau sebagai kepala perpustakaan pusat UI.
3. Bapak Hanindyo, sebagai pembaca dan penguji skripsi, yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat untuk kesempurnaan skripsi ini. Beliau juga yang menjadi narasumber, pengetahuan yang diberikan beliau sangat bermanfaat untuk data skripsi ini.

4. Ibu Ike Iswary, sebagai koordinator skripsi yang telah membantu penulis untuk mendapatkan pembaca dan penguji yang sesuai. Serta mencarikan jadwal yang baik untuk pelaksanaan sidang skripsi.
5. Ibu Margareta, sebagai panitera sidang skripsi penulis.
6. Para dosen program studi Ilmu Perpustakaan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang berguna bagi diri sendiri maupun untuk dikembangkan di dunia luar.
7. Para peneliti hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, dengan baik hati meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadi narasumber penelitian ini.
8. Para Pegawai Mahkamah Konstitusi, khususnya Pustakawan Mahkamah Konstitusi yang sudah dengan sabar membantu penulis mendapatkan data dan memberikan arahan serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai Ayahanda (Alm.) Nur Alamsyah dan Ibunda Zairida Herawati. Tak cukup hanya ucapan terima kasih karena telah merawat, membesarkan, membiayai, memberikan bantuan moril dan materi, doa yang tak pernah henti dipanjatkan, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak dan adikku yang sangat aku cintai dan sayangi, Ricka Alamia Z, SE, Rima Alida Z, SE, dan Khalida Zia Ulfah. Terima kasih atas doa, perhatian dukungan, bantuan, serta semangat yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar H. Adang Rafi'ie dan Keluarga Besar H. Abdullah Sani, untuk semua bantuan dan semangat yang diberikan.
12. Ucapan terima kasih khusus diberikan kepada Ferry "Novio" Fajrin Zubdiarto, yang sudah dengan sabar menghadapi penulis dan memberikan arahan serta tak hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Untuk segala curahan waktu dan perhatian dalam membantu penulis memperbaiki kekurangan yang ada di skripsi ini.
13. Keluarga besar JIP FIB-UI. Senior 2006 dan 2007, serta junior 2009 yang sudah membuat kehidupan perkuliahan penulis semakin berwarna. Terutama angkatan 2008 kelas A, B, C. Khususnya, Weni, Dini, Mira,

Dita, Fahmi, dan banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

14. Terima kasih untuk Rifnelly Harum Hanifah. Sahabat yang selalu membantu dari awal sampai dengan akhir pembuatan skripsi ini. Membantu penulis melengkapi data skripsi dan membantu dalam proses wawancara dengan narasumber. Semoga persahabatan kita tidak terpisah dengan jarak dan waktu.
15. Sahabat-sahabat jalan ku dikala susah maupun senang dalam menjelajahi keindahan alam Indonesia. Nelly, Fitri, Lisna, dan Happy. Sahabat yang selalu membuat penulis semangat untuk pergi ke kampus, maupun semangat untuk merencanakan perjalanan kita selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pernah lupa akan semua hal yang sudah kita lewati selama 4 tahun ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan seluruh pihak dalam membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa ilmu perpustakaan dan masyarakat perpustakaan.

Depok, 15 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Alda H

NPM : 0806465794

Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Peran Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Peneliti Hakim**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2012

Yang menyatakan



(Risa Alda Hatriani)



## ABSTRAK

Nama : Risa Alda H  
Program studi : Ilmu Perpustakaan  
Judul skripsi : Peran Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dalam Memenuhi  
Kebutuhan Informasi Peneliti Hakim

Skripsi ini membahas mengenai peran sebuah perpustakaan khusus instansi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi peneliti hakim dan layanan yang diberikan Perpustakaan MK dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim. Layanan yang dimiliki perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah mampu memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim, walaupun ada beberapa koleksi yang harus ditambah untuk meningkatkan peran perpustakaan yang lebih baik lagi.

Kata kunci : Perpustakaan khusus, kebutuhan informasi, peneliti hakim.

## ABSTRACT

Name : Risa Alda H  
Program of Study : Library Science  
Title : The role of libraries in the constitutional court to fulfill the information needs of judges researchers

This research examines the role of a special library of a governmental body in fulfilling the need of information by the judges' researchers. This research is to identify the need of information by the judges' researchers and the services provided by Perpustakaan Mahkamah Konstitusi in fulfilling the need of information by the judges' researchers. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research shows that Perpustakaan Mahkamah Konstitusi has been able to fulfil the need of information by the judges' researchers. The services provided by Perpustakaan Mahkamah Konstitusi has been able to fulfill the need of information by the judges' researchers, even though there are some collection that should be added to increase the role of a better library.

Keywords: Special library, Information needs, Judges' researchers

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Perpustakaan Khusus .....	8
2.1.1 Definisi Perpustakaan Khusus .....	8
2.1.2 Ciri Perpustakaan Khusus .....	9
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Khusus .....	11
2.1.4 Visi dan Misi Perpustakaan Khusus .....	13
2.1.5 Tugas Perpustakaan Khusus .....	14
2.1.6 Karakteristik Perpustakaan Khusus .....	14
2.1.7 Koleksi Perpustakaan Khusus .....	16
2.1.8 Layanan Perpustakaan Khusus .....	17
2.1.9 Pengelolaan Perpustakaan Khusus .....	19
2.1.10 Peran Perpustakaan Khusus .....	21

2.2	Kebutuhan Informasi .....	23
2.2.1	Pengertian Kebutuhan Informasi .....	23
2.2.2	Jenis Kebutuhan Informasi.....	26
2.2.3	Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Informasi.....	27
2.2.4	Karakteristik Kebutuhan Informasi.....	28
2.2.5	Sumber Informasi .....	28
2.3	Peneliti Hakim.....	29
2.3.1	Profil Peneliti Hakim .....	29
2.3.2	Kebutuhan Informasi Peneliti Hakim .....	29
<b>III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	31
3.2	Metode Penelitian.....	19
3.3	Subjek dan Objek Penelitian.....	32
3.4	Tempat Penelitian.....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5.1	Wawancara .....	33
3.5.2	Observasi .....	33
3.5.3	Dokumen lain yang terkait .....	34
3.6	Pemilihan Informan.....	34
3.6.1	Data Informan.....	35
3.7	Teknik pengolahan dan analisis data.....	35
<b>IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
4.1	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	37
4.1.1	Sejarah singkat Mahkamah Konstitusi RI.....	37
4.1.2	Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi RI .....	40
4.1.3	Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi RI .....	40
4.2	Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI .....	41
4.2.1	Sejarah Perpustakaan .....	41
4.2.2	Visi dan Misi Perpustakaan.....	42
4.2.3	Struktur Organisasi Perpustakaan.....	43
4.2.4	Koleksi Perpustakaan.....	43

4.2.5	Pemakai Perpustakaan.....	45
4.2.6	Layanan Perpustakaan.....	45
4.2.7	Sarana Temu Kembali Perpustakaan .....	47
4.2.8	Automasi Perpustakaan.....	47
4.3	Kebutuhan Informasi Peneliti Hakim Konstitusi .....	48
4.4	Sarana Pencarian Informasi Peneliti Hakim Konstitusi .....	51
4.5	Pengembangan Koleksi Untuk Pemenuhan Informasi Peneliti Hakim	53
4.6	Keberadaan Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi.....	55
4.7	Layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi peneliti hakim.....	57
4.7.1	Abstraksi.....	60
4.7.2	Layanan Antar (Delivery Order) .....	62
4.7.3	Current Awareness Services (CAS) .....	63
4.7.4	Layanan pinjam antar perpustakaan.....	64
4.8	Peran Perpustakaan MK terhadap kebutuhan informasi peneliti hakim	65
4.9	Pemenuhan Kebutuhan Informasi bagi Peneliti Hakim .....	66
<b>V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	69
5.1	Kesimpulan .....	69
5.2	Saran .....	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
	LAMPIRAN.....	73

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar bab I pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi sistem peradilan. Peradilan merupakan institusi atau lembaga penegak hukum untuk membela masyarakat Indonesia dalam mendapatkan hak yang seadil-adilnya. Begitu pentingnya sebuah peradilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, yang diharapkan mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan diharapkan pula efektifitas hukum tampak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kebenaran, keadilan, kepastian hukum tercipta ditengah-tengah kehidupan individu maupun masyarakat. Kebebasan berdemokrasi, transparansi, dan kemerdekaan akan benar-benar dirasakan oleh semua warga negara, apabila sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih jauh dari kata berhasil untuk mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakatnya. Masih banyaknya keputusan yang tidak sesuai dengan tuntutan yang ditunjukkan masyarakat, membuat makin jauh dari kata berhasil mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya. Maka dari itu, perlu dibuat sebuah lembaga hukum yang bisa menguji hukum secara konstitusional.

Indonesia memiliki lembaga hukum tertinggi untuk memutuskan perkara di peradilan umum. Namun, hal ini masih dirasa kurang memadai dalam hal menegakkan keadilan. Indonesia masih membutuhkan sebuah lembaga hukum yang mampu menguji undang-undang secara konstitusional. Keberadaan Mahkamah Agung masih dirasakan belum cukup sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, demi mencapai keadilan hukum. Fungsi Mahkamah Agung masih memiliki kekurangan, contohnya, Mahkamah Agung tidak dapat menguji

undang-undang maupun memutuskan bahwa suatu undang-undang menjadi tidak sah. Selain itu, Mahkamah Agung juga tidak dapat menyelesaikan sengketa hasil pilkada yang saat ini menjadi isu hangat diranah peradilan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang didirikan tanggal 15 Oktober 2003. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diawali dengan lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang (*judicial review*) yang diterapkan pertama kali di Amerika Serikat. Di dalam UUD disusun konsep pembagian kekuasaan. Tugas seorang hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang. Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:

- Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Memutus pembubaran partai politik;
- Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Hampir selama 9 tahun Mahkamah Konstitusi terbentuk, sudah banyak perkara yang ditangani lembaga tersebut. Berbagai pengujian undang-undang, penyelesaian perselisihan hasil pilkada maupun pemilihan umum sudah sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Demi menghasilkan keputusan yang baik

dan tidak merugikan kedua belah pihak secara konstitusional, para hakim membutuhkan bahan referensi yang kuat untuk mempertahankan keputusan yang mereka buat. Putusan yang dibuat oleh MK harus memenuhi rasa keadilan warga negara dan juga berkualitas yang tercermin dari putusan yang mengandalkan kajian ilmiah, pertimbangan hukum yang bersumber dari berbagai referensi akademis, sehingga perpustakaan menjadi andalan bisa didapatnya berbagai sumber informasi referensi tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap segala keputusan MK tentunya tidak lepas dari peran besar petinggi Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai hakim konstitusi. Para hakim tersebut memiliki peran yang sangat strategis bagi keputusan perkara.

Peran yang dijalankan para hakim dalam membuat keputusan, tentunya tidak lepas dari keberadaan berbagai macam informasi. Bagi para hakim, informasi menjadi bagian paling penting dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam lembaganya. Hakim membutuhkan berbagai informasi yang up to date dan relevan dengan kasus yang sedang mereka tangani. Informasi tersebut digunakan untuk membantu merumuskan dan membuat keputusan akhir yang tepat dalam pengujian undang-undang atau menyelesaikan perselisihan pemilihan umum. Keputusan yang tepat akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa untuk menunjang kebutuhan informasi penggunaannya. Hal tersebut telah ada sejak dulu dan terus berproses secara alamiah menunjuk kepada suatu kondisi dan tingkat perbaikan yang signifikan meskipun belum memuaskan semua pihak. Perpustakaan pada prinsipnya mempunyai tiga kegiatan pokok, pertama, mengumpulkan semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi organisasi dan masyarakat yang dilayaninya. Kedua, melestarikan, memelihara, dan merawat seluruh koleksi perpustakaan, agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak pakai, dan tidak lekas rusak, baik karena pemakaian maupun karena usianya. Ketiga, menyediakan dan menyajikan informasi untuk siap dipergunakan dan diberdayakan seluruh koleksi yang dihimpun di perpustakaan untuk dipergunakan pemakainya. Keberadaan



perpustakaan di berbagai lembaga atau instansi merupakan ciri lembaga yang intelek, berwawasan dan mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai landasan bekerja.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan informasi yang makin meningkat, kini hampir di setiap instansi perusahaan atau lembaga hukum negara memiliki pusat informasi perpustakaan sendiri, ini ditujukan demi mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan instansi atau lembaga dalam menjalankan usahanya.

Kebutuhan akan informasi akan mengantarkan kita pada sumber-sumber darimana informasi tersebut didapat. Perpustakaan dapat dijadikan salah satu sumber untuk mendapatkan informasi. Perpustakaan juga bisa dijadikan acuan atau alternatif mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, perpustakaan juga dapat dijadikan sumber referensi. Para hakim dan peneliti tetap menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, walaupun mereka bisa mendapatkan informasi dari sumber lainnya. Keberadaan perpustakaan di lingkungan mahkamah konstitusi dirasakan cukup penting karena perpustakaan mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam bentuk informasi yang bersifat primer maupun sekunder. Informasi ini berguna untuk mendukung kinerja dan peran hakim di mahkamah konstitusi. Lembaga sebesar Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya memiliki perpustakaan yang dapat mendukung semua kegiatannya. Sejalan dengan visi dari Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat, maka Mahkamah Konstitusi harus bekerja keras melahirkan keputusan-keputusan yang tepat untuk segala tuntutan yang diberikan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis ingin membuat asumsi awal antara kesadaran akan pentingnya sebuah pusat informasi (perpustakaan) dengan peran yang dimainkan oleh perpustakaan khusus atau pusat informasi yang dimiliki sebuah instansi atau lembaga dengan mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan informasi terhadap penggunanya, dalam penelitian ini penulis membatasi pada pemenuhan kebutuhan informasi untuk hakim dan peneliti hakim. Peneliti juga mempunyai asumsi dasar bahwa koleksi, jasa, dan referensi yang diberikan oleh

perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah dapat memenuhi kebutuhan informasi hakim dan peneliti hakim.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menemukan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan perpustakaan khusus di lembaga pemerintahan dan peran yang dijalankan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi penggunanya, dalam hal ini khususnya peneliti. Permasalahan yang menjadi penelitian ini adalah bagaimana peran perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim.

Dari permasalahan tersebut, penulis berharap dapat mengetahui peran perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan bagaimana perpustakaan berusaha mengadakan sumber referensi bagi peneliti. Apakah layanan yang diberikan sudah mampu memenuhi kebutuhan informasi dan dapat menunjang keberhasilan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemerintah yang mampu memutuskan hasil perkara dengan baik.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

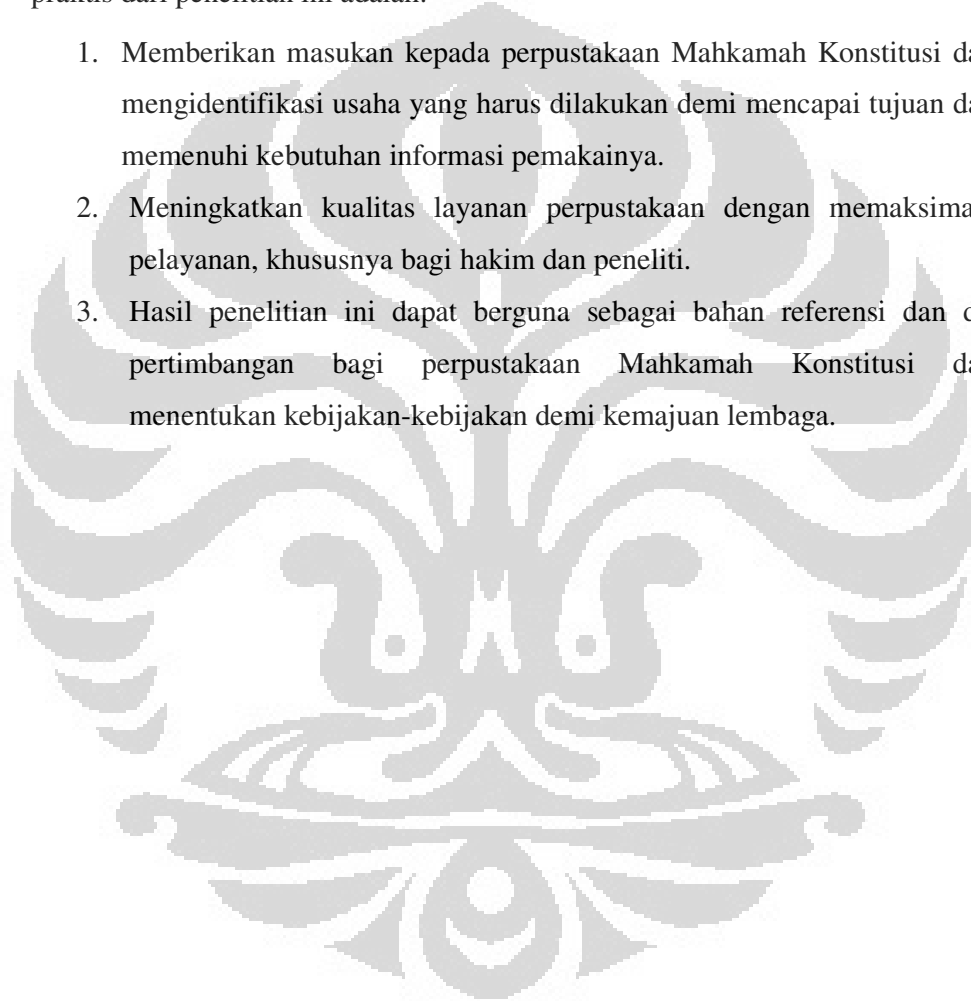
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan para peneliti hakim.
- b. Mengetahui jasa-jasa atau layanan-layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi peneliti hakim.
- c. Mengetahui peran perpustakaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan informasi dari peneliti hakim

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat secara akademis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan perpustakaan khusus di lembaga pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu perpustakaan, khususnya di lembaga pemerintahan. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan kepada perpustakaan Mahkamah Konstitusi dalam mengidentifikasi usaha yang harus dilakukan demi mencapai tujuan dalam memenuhi kebutuhan informasi pemakainya.
2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan memaksimalkan pelayanan, khususnya bagi hakim dan peneliti.
3. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi dan dasar pertimbangan bagi perpustakaan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kebijakan-kebijakan demi kemajuan lembaga.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada hakikatnya setiap perpustakaan memiliki sejarah yang berbeda-beda. Setiap perpustakaan juga mempunyai tujuan, anggota, organisasi, dan kegiatan yang berbeda pula. Perbedaan tujuan, organisasi induk, anggota, dan kegiatan inilah yang mempengaruhi timbulnya berbagai jenis perpustakaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya berbagai jenis perpustakaan (Sulistiyobasuki, 1993).

- 1) Tanggapan terhadap berbagai jenis pustaka. Berbagai perpustakaan menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap bahan pustaka. Misalnya, perpustakaan nasional mengumpulkan semua jenis bahan pustaka, perpustakaan khusus lebih mengkhususkan diri pada koleksi yang mereka anggap penting untuk dikoleksi. Dengan demikian tanggapan yang berbeda terhadap berbagai jenis bahan pustaka akan menimbulkan berbagai jenis perpustakaan.
- 2) Tanggapan terhadap keperluan informasi berbagai kelompok pembaca. Beragamnya kelompok pembaca dan kebutuhan jenis bacaan yang berbeda pula akan tumbuh perpustakaan yang mengkhususkan diri untuk kelompok pembaca tertentu.
- 3) Tanggapan yang berlainan terhadap spesialisasi subjek, termasuk ruang lingkup subjek serta rincian subjek yang bersangkutan. Kebutuhan informasi mengenai suatu subjek yang berbeda-beda intensitas intelektualnya maka tumbuh berbagai jenis perpustakaan dengan koleksi yang sesuai dengan keperluan dan tingkat intelektualitas pembaca.

Banyaknya tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai faktor maka timbullah berbagai jenis perpustakaan. Adapun jenis perpustakaan yang ada dewasa ini adalah perpustakaan internasional, perpustakaan nasional, perpustakaan umum dan perpustakaan keliling, perpustakaan pribadi, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Dari sekian banyaknya istilah dan jenis perpustakaan tersebut, sebetulnya

berdasarkan sifat dan golongan besar, perpustakaan secara umum terbagi dalam sebuah bentuk perpustakaan khusus dan perpustakaan umum. Dari kedua perpustakaan tersebutlah berkembang istilah lain yang disesuaikan dengan cara pengelolaan, pengguna, tujuan, teknologi yang digunakan, pengetahuan yang dikemas, serta tujuan perpustakaan didirikan.

## **2.1 Perpustakaan Khusus**

Dibagian ini akan dijabarkan mengenai perpustakaan khusus yang terdiri dari definisi, ciri, tujuan, fungsi, visi dan misi, tugas, koleksi, layanan, dan peran perpustakaan khusus.

### **2.1.1 Definisi Perpustakaan Khusus**

Dalam situs *Online Dictionary for Library and Information Science*, perpustakaan khusus adalah sebuah perpustakaan yang didirikan dan didanai oleh perusahaan komersial, asosiasi swasta, instansi pemerintah, organisasi nirlaba, atau kelompok yang memiliki kepentingan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi dari karyawan, anggota, atau staf sesuai dengan misi organisasi dan tujuan. Ruang lingkup atau cakupan koleksi biasanya terbatas pada kepentingan organisasi tersebut.

Menurut Sutarno NS perpustakaan khusus sering disebut juga perpustakaan kedinasan, karena keberadaannya pada lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. Perpustakaan tersebut diadakan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan, baik langsung maupun tidak, dengan instansi induknya. Dengan adanya perpustakaan tersebut maka kebutuhan informasi dan bahan rujukan dapat dengan mudah diperoleh. Oleh karena itu, tugas dan fungsi perpustakaan khusus adalah menyediakan sumber-sumber informasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi yang menaungi perpustakaan tersebut. Keberadaan, eksistensi dan berfungsi atau tidaknya sebuah perpustakaan khusus tersebut juga sangat bergantung kepada lembaga yang bersangkutan. Sementara pemakai perpustakaan biasanya terbatas pada para pegawai lembaga tersebut.

Menurut P Sumardji (1999, p.16) perpustakaan khusus merupakan perpustakaan dengan koleksinya yang bersifat khusus, yang digunakan sebagai sarana penunjang mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat khusus (lingkungan khusus) dalam bidang tertentu.

Perpustakaan khusus merupakan tempat penelitian dan pengembangan, pusat kajian, serta penunjang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia/pegawai. Dalam hal tertentu orang luar, dapat diperbolehkan menggunakan perpustakaan, misalnya untuk suatu penelitian, setelah mendapatkan izin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang/berkepentingan. Perpustakaan ini disebut perpustakaan khusus, karena kekhususan koleksi, pemakai, tempatnya, dan pengelolanya. Istilah perpustakaan kedinasan, karena tugas dan fungsinya dikaitkan dengan tugas-tugas kedinasan lembaga induknya yang harus difasilitasi dan ditunjang agar berlangsung dengan baik.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan khusus merupakan salah satu penyebar informasi di lingkungan instansi atau organisasi yang menaunginya dan memiliki fungsi penting bagi para penggunanya untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan instansi atau organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus harus benar-benar melaksanakan fungsinya tersebut demi tercapainya kesesuaian antara tujuan instansi atau organisasi dengan fungsi perpustakaan.

### **2.1.2 Ciri Perpustakaan Khusus**

Perpustakaan khusus dapat merupakan perpustakaan sebuah departemen, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri, maupun perusahaan swasta (Sulistyo-Basuki, 1993). Perpustakaan khusus juga memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lain. Perbedaan itu dapat dilihat dari subjek koleksi, jenis koleksi, ruang lingkup pelayanan, dan pengguna potensialnya. Adapun ciri perpustakaan khusus ialah:

- a) Perpustakaan khusus umumnya dibentuk oleh suatu instansi (kelembagaan) yang memerlukan dukungan perpustakaan untuk menyediakan informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

sehingga fungsi dan tujuan perpustakaan khusus sangat terkait bahkan ditentukan oleh organisasi induknya.

- b) Cakupan subjek koleksi pustaka utamanya terbatas pada bidang ilmu tertentu dan yang berkaitan saja.
- c) Pelayanan yang diberikan lebih mengutamakan pengguna dari organisasi induk, karena tujuan utama dibentuknya perpustakaan adalah untuk melayani pengguna dari organisasi induknya, walaupun tidak tertutup bagi pengguna lainnya. Perpustakaan khusus saat ini juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Terkadang pengguna perpustakaan khusus lebih banyak dari lingkungan luar organisasi induknya, seperti mahasiswa dan pengajar, dibandingkan dengan pengguna sasaran utamanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, komposisi jenis koleksi, pelayanan, dan kegiatan-kegiatan lainnya perlu lebih bervariasi.
- d) Lokasi perpustakaan khusus tidak selalu dekat atau berada di sekitar tempat tinggal pengguna. Oleh karena itu, layanan perpustakaan yang diberikan tidak cukup dengan cara konvensional yang menunggu secara pasif kunjungan pengguna, tetapi harus menyebarkan informasi secara aktif antara lain melalui jasa kesiagaan informasi, jasa informasi terseleksi, dan jasa penelusuran informasi. Dewasa ini, kegiatan jasa informasi aktif idealnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk pelayanan, teknologi informasi dan komunikasi dapat terjalin kerjasama yang lebih intensif dengan perpustakaan atau pusat informasi lainnya dalam sistem jaringan informasi, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Pemanfaatan jaringan informasi dalam pelayanan informasi menuntut penggunaan teknologi informasi modern, apalagi jika pelayanan harus menjangkau sumber informasi atau perpustakaan lain.
- e) Kedudukan dan status perpustakaan khusus pada suatu institusi belum seragam. Kedudukan dan status perpustakaan khusus bergantung pada eselon dan kebijakan organisasi induk, peran perpustakaan terutama dalam memberikan dukungan informasi, serta tugas dan fungsi perpustakaan yang tidak hanya tentang jasa perpustakaan dan informasi saja, tetapi juga

kegiatan lain yang berkaitan seperti penerbitan, penyampaian hasil karya organisasi induk, serta pengumpulan dan pengolahan umpan balik.

- f) Perpustakaan khusus umumnya memiliki ruangan, jumlah tenaga dan koleksi yang terbatas, tetapi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Untuk mengatasi hal tersebut, perpustakaan berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mencari dan meminta informasi ke sumber-sumber informasi yang kuat dan kompeten.

### **2.1.3 Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Khusus**

Perpustakaan sebagai unit kerja, baik yang berdiri sendiri, maupun yang tergabung dalam unit organisasi yang membawahnya, sebaiknya perlu menetapkan tugas dan fungsinya. Hal ini merupakan pedoman, arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi masing-masing perpustakaan tidaklah sama. Melainkan tergantung pada jenis perpustakaan kebijakan pimpinan lembaga yang bersangkutan.

Tujuan perpustakaan secara umum menurut Sutarno NS (2006, p.53) adalah menghimpun, menyediakan, mengolah, memelihara, dan mendayagunakan semua koleksi bahan pustaka, menyediakan sarana pemanfaatannya, dan melayani masyarakat pengguna, yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan.

Tujuan utama perpustakaan instansi atau perpustakaan lembaga adalah sebagai pusat dokumentasi dan informasi, penelitian dan pengembangan, serta pengolahan data dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pemakainya yang dalam hal ini adalah para staf dan pegawai dari instansi atau lembaga tersebut.

Fungsi perpustakaan selalu dikaitkan dengan jenis perpustakaan dan misi yang diembannya. Fungsi perpustakaan khusus menurut Sutarno NS adalah tempat penelitian dan pengembangan, pusat kajian, serta penunjang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia/pegawai. Selain itu, fungsi utama perpustakaan khusus adalah menjalankan kegiatannya yang meliputi pengumpulan, pemeliharaan, evaluasi, penyimpanan, dan pengorganisasian dengan baik, pencarian kembali dengan sistematis, dan penyebaran informasi dalam bidang suatu instansi atau lembaga tersebut (Rohanda, 1992). Tanggung



jawab perpustakaan instansi atau lembaga adalah mempertemukan kebutuhan-kebutuhan informasi dari para pemakainya yang dalam hal ini adalah para staf/pegawai dengan sumber-sumber informasi yang dibutuhkannya.

Perpustakaan khusus yang baik adalah perpustakaan yang mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna dalam cakupan visi dan misi lembaga induknya. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, maka perpustakaan harus dapat menyediakan sumber-sumber informasi dan layanan-layanan yang memadai. Layanan-layanan yang dimaksud adalah layanan informasi berupa jasa yang diberikan oleh perpustakaan khusus yang mengutamakan pada pengumpulan informasi di perpustakaan khusus atau bagian informasi dalam mengantisipasi permintaan informasi (Saefudin&Setiawan, 2007). Salah satu usaha untuk memaksimalkan jasa yang diberikan adalah sebaiknya pustakawan terlebih dahulu melaksanakan survei kebutuhan informasi dari para pemakai di lembaga tersebut. Pustakawan perlu melakukan semacam penelitian seperti survei kebutuhan koleksi dan informasi apa yang dibutuhkan pengguna dan menentukan jasa informasi apa saja yang dapat disediakan untuk kebutuhan tersebut. Teknologi yang sangat cepat berkembang saat ini, memungkinkan informasi menjadi mudah diperoleh. Dengan adanya jaringan internet, setiap orang dapat masuk dan memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Maka, dengan banyaknya sumber informasi dan data tersebut, pustakawan harus terlibat secara mendalam dalam menentukan informasi apa yang harus disediakan untuk pemakai.

Menurut buku panduan Badan Standarisasi Nasional tahun 2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintahan, fungsi yang harus dimiliki perpustakaan khusus tersebut adalah:

- a. Mengembangkan koleksi yang menunjang kinerja lembaga induknya.
- b. Menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya.
- c. Menjadi *focal point* untuk informasi terbitan lembaga induknya.
- d. Menjadi pusat referal dalam bidang yang sesuai dengan lembaga induknya.
- e. Mengorganisasi materi perpustakaan.
- f. Mendayagunakan koleksi.

- g. Menerbitkan literatur sekunder dan tersier dalam bidang lembaga induknya, baik cetak maupun elektronik
- h. Menyelenggarakan pendidikan pengguna.
- i. Menyelenggarakan kegiatan literasi informasi untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia lembaga induknya.
- j. Melestarikan materi perpustakaan, baik preventif maupun kuratif.
- k. Ikut serta dalam kerjasama perpustakaan serta jaringan informasi.
- l. Menyelenggarakan otomasi perpustakaan.
- m. Melaksanakan digitalisasi materi perpustakaan.
- n. Menyajikan layanan koleksi digital.
- o. Menyediakan akses informasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.

#### **2.1.4 Visi dan Misi Perpustakaan Khusus**

Visi adalah masa depan yang dicita-citakan, predictable (dapat diprediksi) dan dapat diperhitungkan untuk diwujudkan berdasarkan dan berpijak pada kondisi, kekuatan, kenyataan, dan kemampuan yang dimiliki sekarang. Dengan kata lain, visi adalah suatu mimpi tentang masa depan yang akan datang tapi dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Sebuah visi sangat penting untuk suatu perpustakaan, begitu pula dengan perpustakaan khusus agar semua yang telah ditargetkan dalam mendirikan suatu perpustakaan khusus dapat terwujud sesuai dengan lembaga induknya. Menurut Sutarno NS (2006) Visi perpustakaan khusus adalah sama dengan visi lembaga induknya yang bersangkutan.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, sehingga misi merupakan pokok-pokok kegiatan yang harus dirumuskan agar lebih realistis untuk mencapainya. Misi untuk setiap perpustakaan tentu akan berbeda dengan perpustakaan lainnya karena visi yang dipunyai pun berbeda.

Pada prinsipnya menurut Zulfikar Zen (2006:52) secara garis besar misi perpustakaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakainya.

- b. Mendukung dan berpartisipasi dalam program-program perpustakaan bagi masyarakat pemakainya.
- c. Memberikan kemudahan kepada pengembangan informasi peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
- d. Menciptakan dan memantapkan kebiasaan membaca masyarakat pengguna perpustakaan tersebut.

### **2.1.5 Tugas Perpustakaan Khusus**

Berdasarkan buku pedoman pengelolaan perpustakaan khusus instansi pemerintahan (2009) tugas perpustakaan khusus adalah: “Menyusun kebijakan dan melakukan tugas rutin untuk mengadakan, mengolah, dan merawat pustaka serta mendayagunakannya baik bagi instansi tersebut maupun diluar instansi tersebut”.

Tugas perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah:

1. Menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas lembaga induknya dalam bentuk penyediaan materi perpustakaan dan akses informasi.
2. Mengumpulkan terbitan dari dan tentang lembaga induknya.
3. Memberikan jasa perpustakaan dan informasi
4. Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang tugas perpustakaan.
5. Meningkatkan literasi informasi.

Untuk keperluan tersebut maka dibutuhkan kerjasama yang erat antara pustakawan dan peneliti agar semua koleksi serta fasilitas yang disediakan betul-betul yang dibutuhkan oleh user (pengguna).

### **2.1.6 Karakteristik Perpustakaan Khusus**

Setiap perpustakaan memiliki karakteristik tersendiri, begitu juga dengan perpustakaan khusus. Brittin (1992) menjelaskan mengenai karakteristik perpustakaan sebagai berikut:

- a. Ukuran gedung

Ukuran perpustakaan khusus beragam mulai dari kapasitas 1 orang sampai lima puluhan orang. Namun, biasanya perpustakaan khusus selalu lebih

kecil dari perpustakaan umum atau perguruan tinggi. Dari segi struktur, perpustakaan khusus juga biasanya tidak mempunyai staf yang terhirarki berdasarkan fungsinya. Terkadang, satu orang staf dapat melakukan pekerjaan mulai dari pengadaan sampai pelayanan.

Sering ditemukan didalam kebanyakan perpustakaan khusus bahwa staf perpustakaan tidaklah harus orang yang ahli dan profesional di bidangnya. Bahkan seorang sekretaris pun tak jarang dipercaya untuk mengelola perpustakaan di waktu-waktu luangnya. Kadang menjadi sebuah persepsi bahwa orang-orang yang sudah tidak dibutuhkan dan tidak terlalu berperan di sebuah instansi, mereka akan ditempatkan diperpustakaan. Hal ini tentu saja berangkat dari minimnya pemahaman mengenai urgensi dan pemberian nilai terhadap perpustakaan.

b. Pengguna perpustakaan

Kebanyakan perpustakaan khusus sudah mempunyai pengguna yang jelas yang minat dan kebutuhannya sudah dapat diraba. Untuk perpustakaan khusus yang sudah lebih terbangun dengan baik, bahkan dibentuk analisa kebutuhan informasi untuk masing-masing personil dalam organisasi. Perpustakaan dapat membuat klasifikasi pengguna dan memetakan kebutuhan informasi. Klasifikasi ini yang kemudian akan membantu pustakawan dalam menentukan prioritas bahan pustakan apa yang akan dibeli lebih dahulu. Terkadang, perpustakaan khusus juga melayani kebutuhan masyarakat umum. Biasanya segmentasi masyarakat yang dilayani pun yang masih memiliki visi yang sama dengan organisasi. Tujuan pelayanan umum ini salah satunya adalah untuk pengembangan ilmu.

c. Bahan pustaka

Perpustakaan khusus memiliki stok yang besar dan materi yang luas pula cakupannya. Misalnya tidak hanya buku dan jurnal, tapi juga bahan pustaka lain. Jenis materi tergantung dari *core business* organisasi induk. Materi perpustakaan khusus bervariasi mulai dari video, laporan internal, panduan teknis, prosiding, laporan tahunan, notulensi rapat, standar, pamflet, paten, putusan, dan sebagainya.

d. Pelayanan

Menjalin hubungan yang baik dengan penggunanya, perpustakaan khusus biasanya lebih menekankan proporsi aktif untuk melayani pengguna daripada reaktif. Pelayanan yang diberikan biasanya berupa *current awareness*, *press cutting*, dan SDI.

### 2.1.7 Koleksi Perpustakaan Khusus

Pada dasarnya setiap perpustakaan mempunyai koleksi. Namun, masing-masing perpustakaan menyediakan koleksi yang dapat menunjang program atau kegiatan sesuai dengan jenis dan fungsi perpustakaan yang bersangkutan. Besar kecilnya koleksi perpustakaan tergantung pada jumlah anggota, bidang spesialisasi, serta dana yang tersedia. Disamping itu, besar kecilnya dan ragam koleksinya juga tergantung pada jenis perpustakaan. Koleksi suatu perpustakaan khusus adalah tidak terletak dalam banyaknya jumlah bahan pustaka atau jenis terbitan lainnya, melainkan ditekankan kepada kualitas koleksinya. Hal ini diharapkan dapat mendukung jasa penyebaran informasi muktahir serta penelusuran informasi. Koleksi perpustakaan khusus difokuskan pada koleksi *up-to-date* dalam subjek yang menjadi tujuan perpustakaan tersebut atau untuk mendukung kegiatan badan induknya.

Menurut buku petunjuk yang dikeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai perpustakaan khusus instansi pemerintah. Perpustakaan khusus di instansi pemerintahan memiliki koleksi dasar yang menjadi perhatian untuk lebih dikembangkan dibanding koleksi lainnya. Koleksi dasar tersebut adalah:

- a) Perpustakaan khusus instansi pemerintahan memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 1.000 judul dalam bidang kekhususannya.
- b) Sekurang-kurangnya 80% koleksinya terdiri dari subyek/disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi induknya.
- c) Perpustakaan menyediakan koleksi terbitan dari dan tentang instansi induknya.
- d) Perpustakaan melanggan minimal 10 judul majalah yang berkaitan dengan kekhususan instansi induknya.

Jenis koleksi perpustakaan khusus instansi pemerintah sekurang-kurangnya meliputi, buku yang terkait di bidangnya, serial, koleksi referensi, dan laporan.

Selain itu, koleksi perpustakaan khusus mencerminkan kebutuhan informasi dan minat dari organisasi atau institusi dimana perpustakaan tersebut bernaung. Perpustakaan khusus berperan mempertemukan pengguna dengan sumber-sumber informasi yang dibutuhkannya. Pembinaan koleksi perpustakaan khusus menekankan pada beberapa jenis bahan pustaka seperti referensi, buku teks, majalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan sejenisnya dalam bidang khusus, baik dalam bentuk tercetak maupun media rekam lainnya.

### **2.1.8 Layanan Perpustakaan Khusus**

Layanan informasi yang disediakan oleh perpustakaan khusus merupakan salah satu karakteristik yang membedakan perpustakaan khusus dengan perpustakaan jenis lainnya. Layanan informasi yang diberikan sedapat mungkin harus memudahkan pemakai dalam menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi. Layanan informasi perpustakaan khusus harus disesuaikan dengan kebutuhan pemakai (Prasad, 1992) .

Ada tujuh jenis layanan informasi yang dapat disediakan oleh perpustakaan khusus, antara lain:

- a. Layanan peminjaman. Sering disebut sebagai layanan sirkulasi. Layanan ini meliputi peminjaman dan pengembalian buku.
- b. Layanan pinjam antar perpustakaan. Layanan ini merupakan alternatif untuk mengatasi keterbatasan subjek maupun jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan khusus.
- c. Layanan referensi. Tidak terbatas pada menjawab pertanyaan, tetapi juga memberikan informasi selengkapnya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh pemakai.
- d. Layanan bibliografis. Merupakan layanan penyusunan daftar cantuman bibliografi yang pada umumnya hanya mencakup satu bidang saja. Layanan ini dapat dilakukan atas dasar permintaan ataupun inisiatif perpustakaan sendiri.

- e. Layanan kesiagaan informasi (*current awareness services*). Bertujuan untuk mengarahkan informasi kepada pemakai sehingga informasi yang benar dapat sampai kepada orang yang benar dan waktu yang tepat. Selain itu, layanan ini dilakukan oleh perpustakaan untuk memberitahukan kepada pemakai perkembangan terbaru berkaitan dengan bidang subjek yang mereka tekuni. Layanan dapat berupa buletin, email, maupun abstrak dari buku terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan.
- f. Layanan terjemahan. Layanan ini dapat dilakukan sendiri oleh perpustakaan atau dengan menggunakan jasa penerjemah komersial.
- g. Layanan penelusuran *online*. Bertujuan untuk memudahkan pengguna melakukan penelusuran untuk mencari koleksi perpustakaan yang dibutuhkan.

Seorang pustakawan perlu mengenal konsep SDI (*Selective Dissemination of Information*). Sampai dengan saat ini, sudah beberapa perpustakaan yang telah mengadopsi praktik penyebaran informasi secara terseleksi ini. “*Selective Dissemination of Information* (SDI) adalah layanan yang menginformasikan kepada satu orang atau sekelompok kecil individu tentang literatur penting dan koleksi yang diperlukan dengan segera” (Ferguson & Mobley, 1984). Pustakawan perpustakaan khusus dapat berhasil menjalankan program ini karena pengetahuan pribadinya mengenai orang-orang dalam organisasi dan pekerjaan yang mereka lakukan. Pustakawan biasa melakukannya dengan cara informal, misalnya dengan menelpon atau mengirimkan buku atau informasi lain melalui catatan pribadi. Saat ini, SDI secara komersial tersedia dari berbagai sumber yang sama seperti jasa pencarian informasi online (Ferguson & Mobley, 1984).

Layanan-layanan tersebut harus dilakukan dengan sebaik mungkin, agar kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna dapat dipenuhi dengan maksimal. Pustakawan juga diharuskan lebih terlibat dalam aktifitas instansi yang menjadi badan induknya.

### **2.1.9 Pengelolaan Perpustakaan Khusus**

Menurut Arif Surachman, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perpustakaan khusus, yakni:

#### **1. Koleksi**

Koleksi perpustakaan khusus difokuskan pada koleksi muktahir di dalam subyek yang menjadi tujuan perpustakaan tersebut atau untuk mendukung kegiatan badan induknya. Koleksi suatu perpustakaan khusus adalah tidak terletak dalam banyaknya jumlah bahan pustaka atau jenis terbitan lainnya melainkan ditekankan kepada kualitas koleksinya, agar dapat mendukung jasa penyebaran informasi muktahir serta penelusuran informasi.

Pembinaan koleksi perpustakaan khusus menekankan pada beberapa jenis bahan pustaka seperti referensi, buku teks, majalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan sejenisnya dalam bidang khusus, baik dalam bentuk tercetak maupun media rekam lainnya.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Penanganan perpustakaan khusus memerlukan seorang “ahli” dalam bidang/subyek yang ditangani. Hal ini akan mempermudah perpustakaan dalam memberikan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan pemakainya. Untuk itu biasanya dalam perpustakaan khusus ini dibutuhkan seorang pustakawan yang mengerti dan paham akan bidang kerja/bidang yang ditangani oleh lembaga induknya. Sehingga kebutuhan akan “pustakawan khusus” adalah penting.

#### **3. Pengolahan**

Proses pengolahan dalam perpustakaan khusus pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan perpustakaan pada umumnya. Hanya biasanya dalam proses pengolahan dituntut untuk lebih memperhatikan kecepatan dalam temu kembali informasi dan penyajian. Sehingga terkadang dalam klasifikasi contohnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter perpustakaan tersebut.



#### **4. Pengguna**

Perpustakaan khusus dalam pemilihan dan setting pengelolaan sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik penggunanya. Hubungan antara pengguna dan pengelola perpustakaan sangat erat terutama apabila dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan perpustakaan itu sendiri. Tidak sedikit pengguna akan ikut andil dalam menentukan pola pengelolaan dan juga penentuan koleksi/informasi yang perlu disediakan oleh perpustakaan. Pengguna mempunyai arti penting karena pengguna merupakan faktor penting mengapa perpustakaan khusus itu ada.

#### **5. Layanan**

Layanan perpustakaan khusus harus dapat memberikan nilai lebih kepada pengguna dan organisasi/badan induk yang membawahnya. Untuk itu pengelola perpustakaan perlu selalu memberikan alternatif-alternatif dalam penyampaian informasi kepada penggunanya. Aspek layanan menjadi penting untuk diperhatikan dikarenakan tuntutan kebutuhan penyajian informasi yang cepat, tepat dan terbaru selalu ada.

Jenis layanan perpustakaan khusus dapat bersifat terbuka maupun tertutup, tergantung pada kebijakan organisasi, pengelola dan tipe penggunanya. Namun kebanyakan perpustakaan khusus menerapkan sistem terbuka dengan akses terbatas. Hal ini untuk lebih memberikan peluang kepada penggunaan yang lebih luas namun tetap terkontrol. Terbuka artinya siapapun dapat memanfaatkan koleksi yang ada, sedangkan akses terbatas adalah pengaturan terhadap proses pemanfaatan koleksi seperti fasilitas pinjam, fasilitas baca, fotokopi, dan sebagainya.

#### **Faktor-Faktor Pendukung Lainnya**

##### **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi merupakan satu hal yang tidak bisa dihindarkan akan masuk ke dalam proses perkembangan perpustakaan. Apalagi dalam perpustakaan khusus yang mengutamakan informasi yang muktahir dan serba cepat, maka penerapan teknologi informasi adalah kebutuhan mutlak. Hal ini terutama

difokuskan pada teknologi yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperoleh informasi lebih luas, cepat, tepat, dan *up to date*, misalkan melalui fasilitas *Internet, Database Online, Media Compact Disk*, dan sebagainya.

### **Jaringan Kerjasama**

Jaringan kerjasama perpustakaan adalah penting, terutama bagi perpustakaan khusus yang memiliki perhatian dalam bidang yang sama. Kerjasama ini akan banyak membantu untuk peningkatan layanan perpustakaan dan saling melengkapi layanan informasi antara satu perpustakaan dan perpustakaan lainnya dalam jaringan tersebut.

### **Pemasaran / Promosi**

Pemasaran atau promosi adalah hal penting yang perlu dilakukan dalam sebuah perpustakaan khusus. Promosi bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara perpustakaan dan calon pengguna. Karena salah satu keberhasilan sebuah perpustakaan adalah dapat dilihat dari tingkat kunjungan pengguna dan pemanfaatan informasi (koleksi) oleh pengguna. Hal yang penting yang harus dipikirkan adalah dukungan dari manajemen, karena promosi mestinya termasuk dalam anggaran perpustakaan dan terintegrasi ke dalam proses perencanaan perpustakaan.

#### **2.1.10 Peran Perpustakaan Khusus**

Peran perpustakaan khusus tergantung pada sifat dari induk organisasi yang menaunginya. Hampir semua perpustakaan khusus secara aktif menyediakan berbagai jenis layanan seperti layanan kesiagaan informasi, penyebaran informasi terseleksi, mengindeks dan mengabstrak, pengiriman dokumen, layanan penelusuran online dan koleksi digital. Implementasi peran perpustakaan khusus dalam mengorganisasi perpustakaan tersebut. Seiring dengan lingkungan yang berubah, dengan meningkatnya harapan pengguna mereka, maka perpustakaan memerlukan kemampuan profesional untuk melakukan pekerjaannya (Singh, 2006). Tujuh hal yang paling penting adalah:

- Mengevaluasi kebutuhan informasi pengguna
- Memerlukan pengembangan informasi berbasis sumber dasar

- Bekerja sebagai manajer konten untuk menganalisa, mengevaluasi, dan mengatur informasi isi dari berbagai kategori sumber.
- Konsolidasi dan pengemasan ulang informasi
- Mengembangkan keterampilan untuk memperoleh, memelihara, dan mendistribusikan berbagai informasi di intranet
- Pelatihan pengguna dalam penggunaan sumber informasi, termasuk produk dan layanan internet dan intranet
- Negosiasi kontrak dengan penyedia informasi untuk memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai lisensi dan aturan hukum lainnya dalam mengakses sumber daya digital yang dapat diakses melalui jaringan internet seperti jurnal atau majalah elektronik.

Pustakawan harus memiliki pemahaman tentang bagaimana informasi akan digunakan, bagaimana pegawai suatu instansi atau lembaga induk melaksanakan pekerjaan mereka, dan bagaimana untuk menghasilkan nilai tambah informasi. Pustakawan bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi induk sesuai dengan misi dalam penyampaian informasi. Pustakawan harus memiliki pemahaman tentang visi dan misi organisasi sehingga perpustakaan dapat benar-benar menjadi bagian integral dari tubuh organisasinya (Singh, 2006). Tujuan perpustakaan khusus adalah untuk mendukung tujuan dan sasaran dari organisasi induk, dimana pustakawan harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap perspektif dan kebutuhan organisasi. Hal ini melibatkan pustakawan untuk memahami struktur organisasi, fungsi masing-masing unit/bagian/departemen organisasi dan hubungan di antara mereka.

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan di atas mengenai perpustakaan khusus, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar fungsi dari perpustakaan khusus adalah menyebarkan informasi yang meliputi bidang instansi atau lembaga yang menaunginya. Selain itu, perpustakaan khusus juga mempertemukan kebutuhan-kebutuhan informasi dari para pemakainya yang meliputi staf/pegawai dengan sumber-sumber informasi yang dibutuhkannya. Perpustakaan khusus harus dapat menyediakan sumber-sumber informasi dan layanan-layanan yang memadai atau dapat menunjang kebutuhan informasi pemakainya. Layanan yang harus dimiliki perpustakaan khusus adalah layanan

informasi yang mengutamakan pada pengumpulan informasi dalam mengantisipasi kebutuhan informasi penggunanya.

Mengenai tugas perpustakaan khusus, penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas perpustakaan adalah mengadakan informasi beserta sumber-sumbernya untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna serta mendayagunakan informasi tersebut baik untuk instansi tersebut maupun diluar instansi tersebut.

## **2.2 Kebutuhan Informasi**

### **2.2.1 Pengertian Kebutuhan Informasi**

Manusia adalah makhluk yang kompleks. Manusia memiliki banyak kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Mulai dari kebutuhan ragawi maupun yang bersifat rohani. Berikut adalah beberapa pengertian tentang kebutuhan informasi.

Menurut Chowdhury (1999) bahwa: “Kebutuhan informasi merupakan suatu konsep yang samar. Kebutuhan informasi muncul ketika seseorang menyadari pengetahuan yang ada padanya tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tentang subjek tertentu”.

Menurut Sankarto, kualitas informasi tergantung pada empat hal, yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan ekonomis. Penjelasannya sebagai berikut:

#### **a. Akurat**

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Dalam prakteknya, mungkin dalam penyampaian suatu informasi banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak isi dari informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat jika mengandung komponen:

- *Completeness*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi tidak lengkap akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.
- *Correctness*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran.

- *Security*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan.

b. Tepat waktu

Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. Saat ini mahalnyanya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkannya, mengolah dan mengirimkannya.

c. Relevan

Informasi harus mempunyai relevansi atau manfaat bagi pengguna. Relevansi informasi untuk satu pengguna tertentu dengan yang lainnya akan berbeda.

d. Ekonomis

Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak dapat tepat taksiran keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.

Menurut Taylor yang dikutip Putubuku (2008), ada empat lapisan atau tingkatan yang dilalui oleh pikiran manusia sebelum sebuah kebutuhan benar-benar dapat terwujud secara pasti:

1. *Visceral need*, yaitu tingkatan ketika kebutuhan informasi belum sungguh-sungguh dikenali sebagai kebutuhan, sebab belum dapat dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman seseorang dalam hidupnya. Inilah kebutuhan “tersembunyi” yang seringkali baru muncul setelah ada pengalaman tertentu.
2. *Conscious need*, yaitu ketika seseorang mulai meraka-reka apa sesungguhnya yang dibutuhkannya.
3. *Formalized need*, yaitu ketika seseorang mulai secara lebih jelas dan terpadu dapat mengenali kebutuhan informasinya, dan mungkin di

saat inilah ia baru dapat menyatakan kebutuhannya kepada orang lain.

4. *Compromised need*, yaitu ketika seseorang mengubah-ubah rumusan kebutuhannya karena mengantisipasi, atau bereaksi terhadap kondisi tertentu.

Belkin yang dikutip Ishak (2006) menyatakan bahwa “Kebutuhan informasi terjadi ketika seseorang menyadari adanya kekurangan dalam tingkat pengetahuannya tentang situasi atau topik tertentu dan berkeinginan mengatasi kekurangan tersebut”. Selain itu, kebutuhan informasi bisa timbul ketika pengetahuan yang dimiliki seseorang kurang dari yang dibutuhkan, sehingga mendorong seseorang untuk mencari informasi (Krikelas dalam Ishak, 2006).

Dari uraian definisi diatas, dapat diketahui bahwa kebutuhan informasi terjadi ketika seseorang menyadari adanya kekurangan dalam mencari kebutuhan akan informasi yang dibutuhkannya dan berusaha untuk mencari kekurangan dalam memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut.

Chowdury (1992) menyatakan sifat-sifat kebutuhan informasi antara lain, sebagai berikut:

- a. Mempunyai konsep yang relatif
- b. Berubah pada periode tertentu
- c. Berbeda antara satu orang dengan orang lain
- d. Dipengaruhi oleh lingkungan
- e. Sulit diukur secara kuantitas
- f. Sulit diekspresikan
- g. Seringkali berubah setelah seseorang menerima informasi lain.

Mengidentifikasi kebutuhan informasi dapat dilakukan dengan cara:

- a) *Current approach*, yaitu memperhatikan kebutuhan pengguna akan informasi mutakhir.
- b) *Everyday approach*, yaitu kebutuhan pengguna akan informasi yang diperlukan sehari-hari.
- c) *Exhaustive approach*, yaitu kebutuhan pengguna akan informasi secara menyeluruh.

- d) *Catching-up approach*, yaitu kebutuhan pengguna akan informasi yang cepat dan singkat. (Prawati dalam Ishak, 2006)

Menurut Hartono (2000) menyatakan bahwa: “Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan”.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan informasi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pencari informasi yang bisa berupa data untuk menggambarkan kejadian-kejadian nyata yang telah diolah dalam satu bentuk sehingga menjadi lebih berguna dan lebih berarti.

### **2.2.2 Jenis Kebutuhan Informasi**

Jenis kebutuhan informasi bagi pengguna informasi sangat beraneka ragam. Berikut ini beberapa pengertian tentang jenis kebutuhan informasi.

Klasifikasi terhadap jenis kebutuhan informasi yang berhubungan dengan tugas pekerjaan (Jarvelin, 2004), yaitu:

1. Informasi yang berkaitan dengan masalah, menggambarkan struktur, sifat, dan syarat dari masalah yang sedang dihadapi.
2. Informasi yang berkaitan dengan wilayah, terdiri dari pengetahuan tentang fakta, konsep, hukum dan teori dari wilayah permasalahan. Informasi yang dibutuhkan bisa terdapat dalam terbitan jurnal ilmiah dan buku teks.
3. Informasi sebagai pemecahan masalah, menggambarkan bagaimana melihat dan memformulasikan masalah, apa masalahnya dan wilayah informasi bagaimana yang akan digunakan dalam upaya memecahkan masalah.

Jenis-jenis informasi dikelompokkan menjadi dua jenis (Yusup, 1995:10), yaitu:

1. Informasi lisan, informasi ini disamping jumlahnya sangat banyak, sulit diukur dan dibuktikan dan juga kurang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan manusia pada umumnya.

2. Informasi terekam, informasi ini paling bermanfaat dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik secara perorangan maupun dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan bergaul sesama anggota masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis kebutuhan informasi yang mutakhir, spesifik, objektif dan pengembang bagi pengetahuan manusia sehingga dapat menyelesaikan masalah *problem-solving information*.

### 2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Informasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengguna perpustakaan akan kebutuhan informasi. Menurut Sulisty-Basuki, kebutuhan informasi ditentukan oleh:

1. Kisaran informasi yang tersedia;
2. Penggunaan informasi yang akan digunakan;
3. Latar belakang, motivasi, orientasi profesional, dan karakteristik masing-masing pemakai;
4. Sistem sosial, ekonomi, dan politik tempat pemakai berada; dan
5. Konsekuensi penggunaan informasi

Setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya, penunjang kegiatannya, dan pemenuhan kebutuhannya. Rasa ingin tahu seseorang timbul karena ia ingin selalu berusaha menambah pengetahuannya. Kebutuhan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, seseorang akan termotivasi untuk mencari pengetahuan, bagaimana caranya agar dapat memecahkan masalah tersebut. Salah satu cara adalah mencari tambahan pengetahuan melalui membaca berbagai media bahan bacaan yang sebagian besar informasi tersebut tersedia di perpustakaan.

Fungsi informasi bisa berkembang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, setidaknya yang utama adalah sebagai data dan fakta yang membuktikan adanya suatu kebenaran, sebagai penjelas hal-hal yang sebelumnya meragukan, sebagai prediksi untuk peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada kenyataannya, sebuah informasi banyak fungsinya. Tidak terbatas pada salah satu bidang atau aspek saja, melainkan



menyeluruh, hanya bobot dan manfaatnya yang berbeda karena disesuaikan dengan kondisi yang membutuhkannya (Yusup, 1995).

Dalam pengadaan bahan pustaka, perpustakaan merupakan faktor yang penting dan perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik sehingga bahan pustaka yang dipesan dapat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

#### **2.2.4 Karakteristik Kebutuhan Informasi**

Menurut Leckie dalam Ishak (2006) menyatakan bahwa:

Kebutuhan informasi memiliki enam karakteristik yang dapat menunjukkan bahwa wujud dari kebutuhan informasi, yaitu:

- a. Demografis seseorang seperti, tingkat pendidikan atau usia
- b. Konteks, misalnya kebutuhan khusus, kebutuhan internal atau eksternal
- c. Frekuensi, misalnya apakah kebutuhan informasi itu berulang atau baru
- d. Kepentingan, misalnya kebutuhan informasi dilihat dari tingkat urgensinya.
- e. Kemungkinan, misalnya apakah kebutuhan informasi tersebut dapat diramalkan atau tidak terduga
- f. Kerumitan, misalnya kebutuhan informasi tersebut mudah atau sulit untuk dipecahkan.

#### **2.2.5 Sumber Informasi**

Perpustakaan merupakan pusat atau sumber informasi bagi seluruh penggunanya. Dengan adanya perpustakaan di setiap instansi atau lembaga pemerintahan, maka seluruh pegawai atau pengguna tetap perpustakaan dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan sehingga kelangsungan aktivitas lembaganya dapat berjalan dengan semestinya. Memfokuskan sumber informasi yaitu hanya kepada segala macam informasi yang secara khusus bisa diawasi, dikendalikan, diolah, dan dikelola untuk kepentingan umat manusia, yakni informasi terkekang yang bisa diperoleh di perpustakaan-perpustakaan dan segala jenisnya, baik informasi yang bersifat ilmiah maupun informasi yang bersifat non-ilmiah seperti informasi tentang keluarga, berita kematian, dan iklan komersial (Yusup, 1995).

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber informasi merupakan segala macam informasi yang bisa diawasi, dikendalikan, diolah, dan dikelola oleh perpustakaan untuk seluruh pengguna yang ingin memenuhi kebutuhan informasi baik informasi yang bersifat ilmiah maupun non ilmiah.

## **2.3 Peneliti hakim**

### **2.3.1 Profil peneliti hakim**

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang hakim dalam menghasilkan keputusan yang tepat dan tidak merugikan masyarakat yang memasukkan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi. Masing-masing hakim konstitusi memiliki 2 (dua) orang peneliti yang membantu mereka untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang mereka tangani.

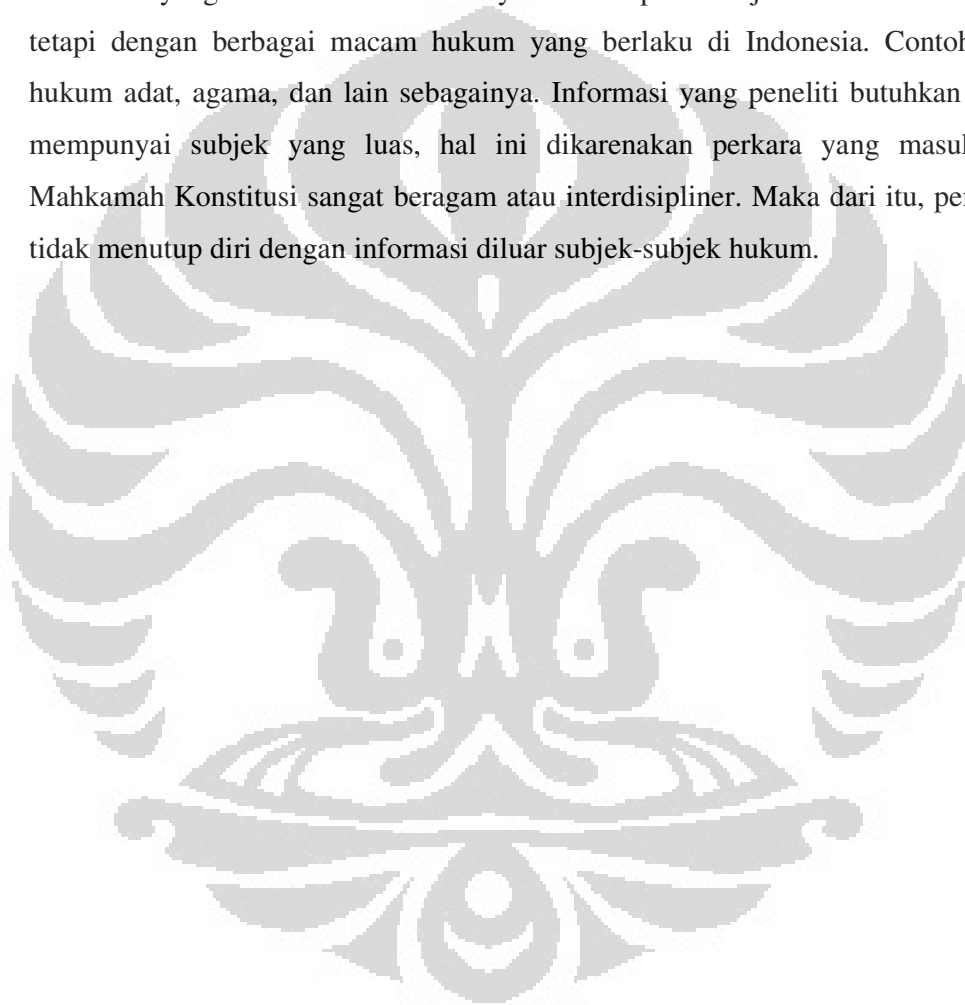
Ada beberapa tugas dari peneliti hakim, antara lain:

1. Membantu hakim menyiapkan bahan-bahan dalam membuat draft legal opinion
2. Membantu hakim untuk membuat kajian perkara
3. Menyusun penafsiran hukum
4. Melakukan monitoring dan evaluasi
5. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan makalah
6. Membuat ikhtisar putusan

Secara harfiah, pengertian peneliti adalah seseorang yang secara umum melakukan penelitian atau mencari suatu pemecahan yang menjadi pertanyaan. Peneliti di Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki peran yang cukup unik dan berbeda dengan peneliti di lembaga pemerintahan lainnya. Peneliti MK tidak hanya melakukan penelitian saja, peneliti disini juga membuat kajian perkara guna mendukung keputusan hakim dalam memutuskan perkara.

### 2.3.2 Kebutuhan Informasi peneliti hakim

Guna mendukung tugas peneliti sebagai pembantu hakim untuk membuat kajian perkara. Kajian yang dihasilkan selanjutnya akan dipakai untuk hasil keputusan persidangan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Peneliti membekali diri dengan berbagai undang-undang serta informasi yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya sebatas pada subjek hukum konstitusi, tetapi dengan berbagai macam hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, hukum adat, agama, dan lain sebagainya. Informasi yang peneliti butuhkan juga mempunyai subjek yang luas, hal ini dikarenakan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sangat beragam atau interdisipliner. Maka dari itu, peneliti tidak menutup diri dengan informasi diluar subjek-subjek hukum.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang peran perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui fungsi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini tergolong pada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan dalam Bagong, 1991, p. 203). Sedangkan John W. Creswell dalam buku Metode penelitian kualitatif, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Berdasarkan cara pemaparannya, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Melalui penelitian ini penulis akan meneliti tentang peran perpustakaan sebagai penyedia kebutuhan informasi dan sumber referensi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terdapat dilapangan, serta hubungan antara fenomena yang diteliti

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

### **3.2 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Studi kasus digunakan karena dapat menyajikan data-data dan temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Selain itu studi kasus memiliki beberapa kelebihan antara lain: luwes dalam metode pengumpulan data yang digunakan, dapat dilaksanakan secara praktis di dalam banyak lingkungan sosial.

### **3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah para peneliti hakim. Sedangkan objeknya adalah peran perpustakaan Mahkamah Konstitusi dalam memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya, khususnya peneliti.

### **3.4 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di Gedung Mahkamah Konstitusi, lantai 5. Jalan Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan informan. Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama karena dari wawancara dapat dihasilkan data tentang persepsi atau penilaian bersifat sangat subjektif dan kualitatif. Wawancara dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun menggunakan pesawat telepon atau melalui email. Akan tetapi, dalam wawancara harus terjadi kontak pribadi, oleh karena itu proses wawancara perlu memahami situasi dan

kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

### **3.5.1 Wawancara**

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan langsung. (Black dan Champion, 1999, p.305). Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Tujuan wawancara mendalam ialah mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Sasaran wawancara mendalam ialah menyelenggarakan wawancara yang memungkinkan para responden membahas secara mendalam sebuah subjek. Responden dan pewawancara harus menaruh minat yang sama pada subjek yang dibahas (Sulistyo-Basuki, 2006, p.173). Selain itu, wawancara mendalam juga merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama. (Bungin, 2007, p.157)

### **3.5.2 Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi. (Iyan, 2009, p.4). Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan adalah suatu prosedur peneliti hanya mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah, tetapi peneliti tidak melakukan partisipasi terhadap kegiatan di lingkungan yang diamati.

### 3.5.3 Dokumen lain yang terkait

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari catatan rekaman wawancara yang bersifat formal dan terencana dalam organisasi sebagai bagian dari kegiatan lembaga yang akan diteliti terutama yang terkait dengan hakim dan staf ahli sebagai subjek utama penelitian. Dokumen internal lembaga seperti profil lembaga, struktur organisasi, profil para hakim Mahkamah Konstitusi, serta dokumen lain mengenai perpustakaan MK seperti jenis dan jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan serta jasa atau layanan yang dimiliki perpustakaan.

### 3.6 Pemilihan Informan

Pada penelitian ini, peneliti akan memilih informan yang dipandang paling tepat dalam memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga pemilihan informan yang tepat dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Cuplikan yang akan digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat *purposive sampling*. Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang berupa manusia (narasumber/informan) memiliki peran yang sangat penting sebagai individu yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Informan tidak hanya sekedar memberikan tanggapan pada apa yang ditanyakan peneliti, tetapi dapat memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang mereka miliki.

Informan atau narasumber dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang peneliti hakim, 1 (satu) orang supervisor perpustakaan dan 1 (satu) orang pustakawan. Dalam menuliskan hasil wawancara dengan informan, penulis akan menggunakan nama samaran untuk beberapa informan. Untuk pemilihan informan tersebut, penulis melakukan observasi dengan mengamati peneliti-peneliti yang aktif menggunakan perpustakaan. Informan yang dipilih penulis adalah peneliti yang sudah bekerja cukup lama di Mahkamah Konstitusi, selain itu yang menjadi kriteria yang paling utama untuk menjadi informan adalah peneliti yang menjadi pengguna aktif perpustakaan. Dengan kata lain, peneliti yang sering menggunakan perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan. Penulis memilih informan masing-masing satu orang peneliti dari masing-masing hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi.

### 3.6.1 Data Informan

1. Informan pertama: Peneliti bernama Nalom, beliau membantu kerja hakim yang bernama Anwar Usman. Beliau sudah menjadi peneliti hakim dari tahun 2007.
2. Informan kedua: Peneliti bernama Sukri, beliau membantu kerja hakim yang bernama Harjono. Beliau sudah menjadi peneliti hakim dari tahun 2007.
3. Informan ketiga: Peneliti bernama Dina, beliau membantu kerja hakim yang bernama Hamdan Zoelva.
4. Informan keempat: Peneliti bernama Ali, beliau membantu kerja hakim yang bernama Achmad Sodiki.
5. Informan kelima: Peneliti bernama Irfan, beliau membantu kerja ketua hakim konstitusi, Mahfud MD.
6. Informan kelima: Supervisor perpustakaan, Hanindyo.
7. Informan keenam: Pustakawan, Dewi.

### 3.7 Teknik pengolahan dan analisis data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang didapatkan dari data.

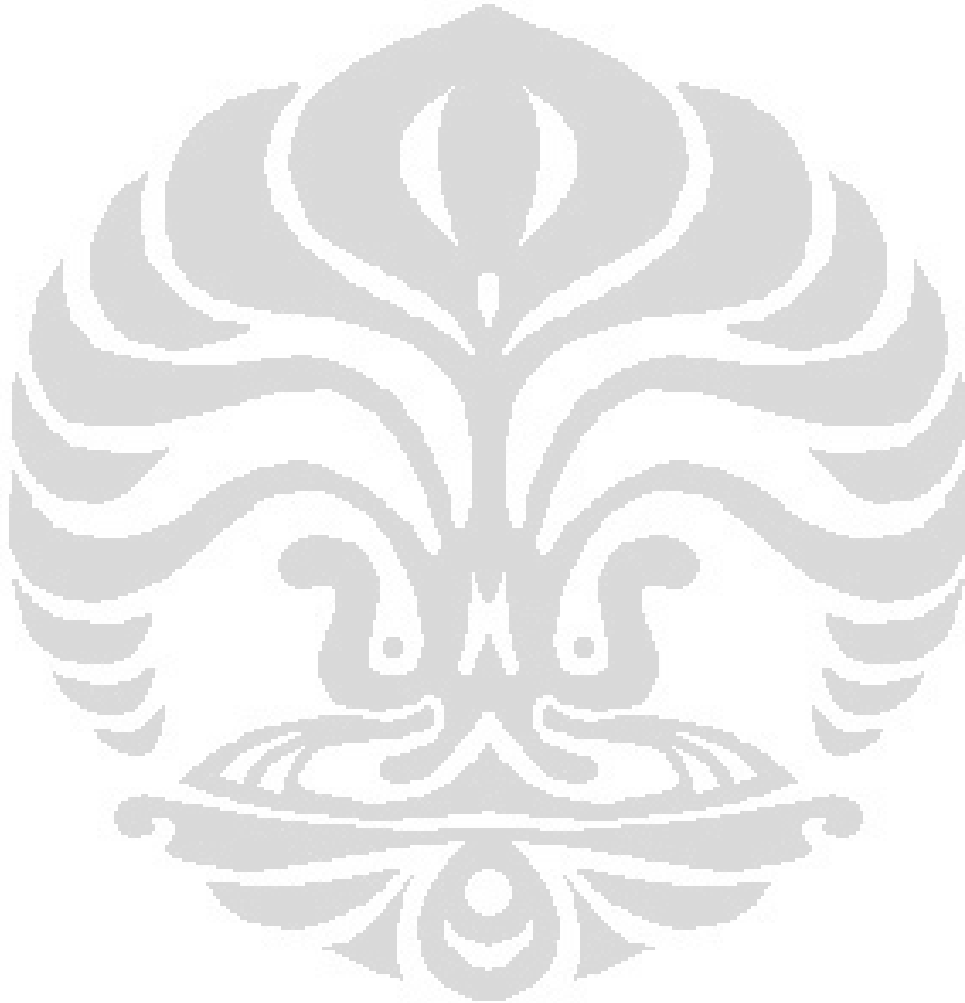
Proses awal dari analisis data adalah pengumpulan data. Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian  
Mengidentifikasi setiap data yang akan dibangun. Transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen, dan hal lain yang merupakan sumber data yang dibutuhkan untuk diberi kode. Semua data termasuk tanggal, beberapa indikator, dan anonim identitas akan memungkinkan dijadikan sumber oleh peneliti.
2. Koding
3. Interpretasi
4. Sajian data



5. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensi terhadap topik, tujuan dan perumusan masalah yang ada.



## **BAB 4**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian beserta analisisnya. Bab ini merupakan analisis mengenai kebutuhan informasi para peneliti hakim di Mahkamah Konstitusi serta peran perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Berasal dari analisis yang dilakukan, akan ditarik kesimpulan tentang peran perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan peneliti hakim. Sebelum menjelaskan hasil penelitian dan analisis, penulis akan memberikan informasi mengenai profil Mahkamah Konstitusi dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

#### **4.1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

##### **4.1.1. Sejarah singkat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau disebut juga MKRI adalah diadopsinya ide mahkamah konstiusi (*constitutional court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim

konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI. Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antarcabang kekuasaan Negara, dilakukan rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga Negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

DPR mengajukan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen TNI (Purn.) H. Achmad Roestand, S.H., dan I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H. Dari Presiden mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., dan Dr. Harjono, S.H., MCL. Sementara MA mengajukan Dr. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. (sekarang beliau bergelar professor), Soedarsono, S.H., dan Maruarrar Siahaan, S.H.

Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah mengucapkan sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk

pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretariat Jendral MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jendral MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Jenedjri M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral MK sejak 4 September 2003 hingga 31 September 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden Megawati menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jendral MK definitive. Dalam perkembangannya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Jenedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jendral MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera bertanggungjawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para Pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK. Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera mendampingi Plt. Sekjen MK adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitive digantikan oleh Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.

Lintasan perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.

Setelah bekerja penuh selama lima tahun, hakim konstitusi periode pertama (2003-2008) telah memutuskan 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), 10 perkara Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara (SKLN), dan 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Periode pertama hakim konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan

sebelum akhir periode tersebut ketiga hakim konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun [berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK, usia pensiun hakim konstitusi adalah 67 tahun], yakni Letjen TNI (Purn) Ahmad Roestandi, S.H. yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. yang posisinya digantikan oleh Dr. H. Mohammad Alim, S.H., M.Hum, dan Soedarsono S.H. yang kedudukannya digantikan oleh Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Tiga nama yang baru menggantikan tersebut sekaligus meneruskan jabatannya sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua (2008-2013).

#### 4.1.2 Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

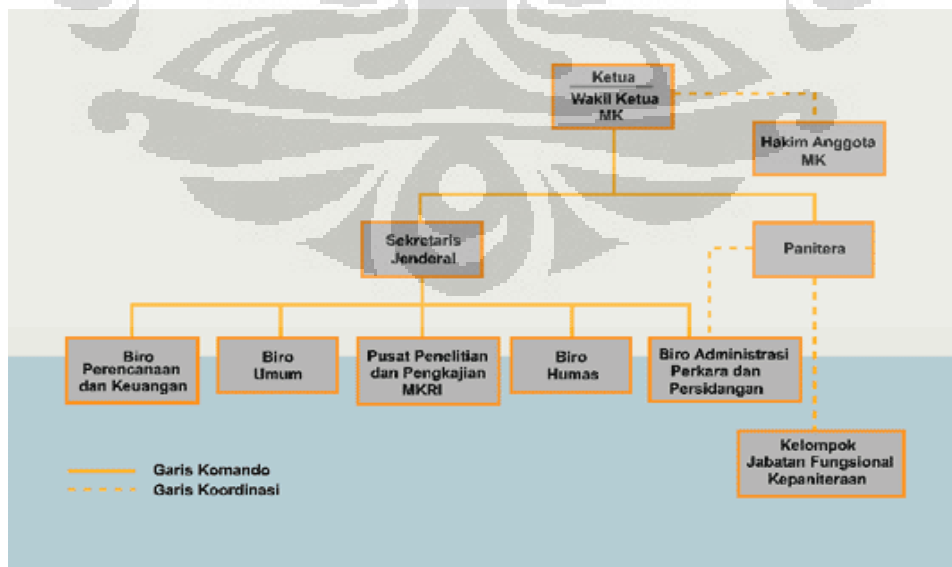
##### Visi Mahkamah Konstitusi:

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

##### Misi Mahkamah Konstitusi:

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab secara organisasi dan didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua MK memimpin dengan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal terdiri atas lima biro yaitu, biro perencanaan dan keuangan, biro umum, biro administrasi perkara dan persidangan. Sedangkan, kepaniteraan bekerjasama dengan biro administrasi perkara dan persidangan.

## **4.2. Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi berlokasi gedung Mahkamah Konstitusi. Beralamat di jalan Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat. Perpustakaan ini menempati 2 lantai yaitu, lantai 5 dan 6. Jam buka perpustakaan ini disesuaikan dengan jam operasional MK yaitu hari senin-jumat, pukul 09.00-17.00 WIB. Namun, apabila di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung sidang sampai melewati batas jam kerja MK, maka perpustakaan juga tidak diperbolehkan tutup atau tidak melayani sirkulasi. Jadi, perpustakaan harus tetap siap sedia melayani permintaan pengguna.

### **4.2.1. Sejarah Perpustakaan**

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Perpustakaan MKRI adalah perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum Tata Negara, Politik, Administrasi Negara, Sejarah, dan Biografi. Perpustakaan MKRI secara administratif mulai berdiri sejak Agustus 2004 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MKRI Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, namun secara operasional Perpustakaan MKRI baru berjalan mulai Januari 2005.

Sejak berdiri, Perpustakaan MKRI bertekad memberikan informasi Hukum, Politik, Sosial, dan informasi terkait lainnya kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia. Sesuai dengan perjalanan waktu dan perkembangan di tubuh MKRI, maka saat ini sedang dilakukan perubahan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal (SetJen) Kepaniteraan MKRI, dan

perpustakaan MKRI akan menjadi bidang Perpustakaan yang bertanggungjawab kepada Kapuslitka dan secara fungsional akan berkolaborasi dengan peneliti dan Tenaga Ahli dalam mendukung Hakim Konstitusi.

Sampai Agustus 2007 Perpustakaan MKRI menempati gedung milik Depkominfo Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, berada di lantai 3 dengan luas ruangan 8 x 6 meter bersatu antara ruang kerja dan ruang baca, dilengkapi dengan rak berisi sekitar 5000 eksemplar buku, jurnal dan terbitan berkala media masa cetak. Saat ini Perpustakaan MKRI menempati gedung baru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat pada lantai 5 dan 6.

Di Gedung baru Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Perpustakaan MKRI menempati lantai 5 dan 6 dilengkapi dengan ruang baca dalam dan ruang baca luar sambil menikmati Dome MKRI yang sekaligus menjadi ruang baca tambahan. Fasilitas yang disediakan adalah referensi tentang Hukum Tata Negara berupa buku-buku yang berkualitas. Bentuk fasilitas lainnya, seperti jaringan internet kabel atau tanpa kabel. Pengunjung bisa menikmati ruang perpustakaan yang cukup representatif, atau menikmati udara luar yang dilengkapi tanaman hias dan tanaman pelindung terik matahari, selain itu juga ada ruang baca melingkar di dalam Dome.

#### **4.2.2. Visi dan Misi Perpustakaan**

##### **Visi Perpustakaan MKRI:**

Menjadi Perpustakaan dan Pusat Informasi Hukum Terlengkap di Indonesia.

##### **Misi Perpustakaan MKRI:**

- Mewujudkan Perpustakaan MKRI sebagai perpustakaan yang menyediakan referensi hukum yang terlengkap di Indonesia.
- Membantu tugas, fungsi, dan kewajiban konstitusional MKRI dalam membangun masyarakat Indonesia yang sadar konstitusi.

### 4.2.3 Struktur Organisasi Perpustakaan

Organisasi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berada langsung dibawah Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian (Kapuslitka) setingkat Eselon II. Kapuslitka bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal (Eselon. I) Sekretaris Jenderal kepada Ketua MK (Pejabat Negara non eselon).

Secara operasional manajemen perpustakaan dikelola oleh 5 orang pustakawan termasuk 1 orang supervisor, sementara untuk kegiatan administrasi, keuangan, diluar kegiatan teknis perpustakaan Pusat penelitian dan Pengkajian memiliki 1 (satu) subbidang TU (es. IV)

### 4.2.4. Koleksi Perpustakaan

Perpustakaan MKRI merupakan perpustakaan khusus di bidang hukum tata negara dan konstitusional, koleksi perpustakaan ini mencakup:

- a. Koleksi umum dan referensi bidang hukum tata negara, sosial, politik, administrasi negara.
- b. Koleksi Putusan Persidangan, Risalah Sidang, dan Berita Acara Persidangan.
- c. Koleksi UUD 1945 dalam berbagai bahasa.
- d. Koleksi Undang – Undang, TAP MPR, Peraturan Pemerintah.

Jenis Pustaka	Jumlah Judul Pustaka
Monograf	7240
Koleksi Putusan	174
Risalah Sidang	469
Koleksi UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, TAP MPR	256

Untuk lebih jelasnya, koleksi perpustakaan dibagi menjadi beberapa bagian pustaka yang terdiri dari:



**Pustaka Klasifikasi**

Hukum=70,47%

Seni dan Olahraga=0,3%

Geografi dan Sejarah=6,62%

Kesusasteraan=1,77%

Filsafat dan Psikologi=1,97%

Karya Umum=7,06%

Bahasa, Kamus=1,62%

Manajemen=4.85%

Agama=4,39%

**Pustaka Bahasa**

Inggris=51,59%

Indonesia=48.37%

Jerman=0,01%

Korea=0,02%

**Pustaka Jenis**

Text Book=96,61%

Artikel=0,01%

E-Book=1,9%

Putusan=0,76%

Jurnal/Majalah=0,72%

**Pustaka Terbitan**

Luar negeri=28,88%

Dalam negeri=71,12%

**b. Koleksi referensi**

Koleksi referensi yang dimiliki Perpustakaan MK, antara lain:

- Kamus
- Ensiklopedia
- Direktori
- Biografi

**c. Koleksi Surat Kabar**

Perpustakaan MK melanggan beberapa majalah dan surat kabar, yaitu:

1. Majalah. Majalah yang dilanggan oleh MK tidak hanya majalah lokal (dalam negeri), tetapi juga majalah yang diterbitkan diluar negeri, antara lain:

- a) Majalah Tempo

- b) Majalah Gatra
- c) Readers Digest
- d) National Geographic Ind.
- e) Majalah Time

2. Surat kabar. Koleksi surat kabar yang dilanggan MK, antara lain:

- a. Kompas
- b. Koran tempo
- c. Republika
- d. Media Indonesia
- e. Warta kota
- f. Bisnis Indonesia
- g. Harian Sindo
- h. Indo Post

Koleksi-koleksi tersebut hanya bisa dipinjam oleh pegawai MKRI. Untuk masyarakat umum, koleksi-koleksi ini tidak bisa dipinjam dan hanya bisa difotokopi atau membacanya di ruang baca.

Jumlah koleksi sampai tahun 2011 adalah 8363 judul (termasuk e-book 167 judul), 22517 eksemplar. Pada tahun 2011 perpustakaan menambah koleksi e-book sebanyak 69 judul, yang bisa diakses melalui web MKRI pada jendela perpustakaan.

#### **4.2.5. Pemakai Perpustakaan**

Pemakai potensial perpustakaan MKRI adalah semua pegawai MKRI. Namun, pemakai yang paling diprioritaskan oleh perpustakaan ini adalah kebutuhan untuk 9 hakim konstitusi dan penelitiannya. Koleksi yang ada di perpustakaan bebas dipinjam oleh pegawai MKRI, selain pemakai internal ada juga pemakai eksternal yang berasal dari mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran statistik pengunjung perpustakaan MKRI.

#### **4.2.6. Layanan Perpustakaan**

Sistem layanan pada perpustakaan ini adalah sistem layanan terbuka. Layanan terbuka adalah pengguna dapat mencari atau menelusur langsung ke rak, sistem layanan ini berlaku untuk semua koleksi.

Selain itu terdapat juga beberapa macam layanan-layanan yang diberikan kepada pengguna Perpustakaan MKRI adalah sebagai berikut.

#### 1. Layanan Literatur

Perpustakaan MKRI memberikan layanan mengenai koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan MKRI. Seperti buku-buku teks, buku referensi, jurnal-jurnal baik mengenai hukum maupun subjek lainnya.

#### 2. Ruang Baca

Perpustakaan MKRI mempunyai lima jenis ruang baca, yaitu ruang baca hakim, ruang baca umum, ruang baca outdoor, ruang baca doom (bundar), dan ruang audio visual.

#### 3. Layanan Internet dan Hotspot

Perpustakaan MKRI menyediakan komputer yang telah terhubung dengan jaringan internet baik pada lantai 5 maupun pada lantai 6 kepada pengguna. Selain itu, apabila pengguna ingin memakai jaringan hotspot dengan laptop mereka masing-masing, maka perpustakaan MKRI menyediakan layanan hotspot dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. layanan ini diberikan tanpa memungut bayaran dari pengguna.

#### 4. Layanan Sirkulasi Mandiri

Perpustakaan MKRI memfasilitasi pengguna dengan alat sirkulasi mandiri yang memudahkan pengguna untuk melakukan kegiatan sirkulasi tanpa harus mendatangi bagian sirkulasi perpustakaan. Alat-alat sirkulasi mandiri adalah sebagai berikut.

- Shelf Check → digunakan untuk melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku.
- Book drop → digunakan untuk mengembalikan buku yang telah selesai dibaca atau dipinjam.

#### 5. Layanan Konsultasi dan Diskusi

Pustakawan MKRI melayani pengguna dalam hal konsultasi dan diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi atau isu-isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat saat ini.

#### 6. Layanan Fotokopi

Layanan ini diberikan kepada pengguna khususnya pada masyarakat umum yang tidak bisa meminjam koleksi yang ada pada perpustakaan.

#### 7. Layanan Referensi

Perpustakaan MKRI menyediakan jasa referensi untuk membantu pengguna yang kesulitan mencari informasi mengenai hukum, tata negara. Penelusuran informasi dapat datang langsung ke perpustakaan di lantai 6. Selain itu, layanan referensi dapat juga melalui telepon, dan email.

#### **4.2.7. Sarana Temu Kembali Perpustakaan**

Sarana temu kembali merupakan sarana yang digunakan oleh pengguna maupun staff perpustakaan untuk memudahkan penelusuran informasi atau mencari koleksi perpustakaan yang dibutuhkan. Penelusuran informasi pada Perpustakaan MKRI dapat dilakukan dengan menggunakan OPAC (Online Public Access Catalog) / katalog online yang biasa disebut dengan SIMPUS yang memakai bahasa pemrograman JavaScript yang bekerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam proses pembuatannya. Penelusuran pada katalog online dapat dilakukan melalui judul, pengarang, penerbit, subjek, dan ISBN.

#### **4.2.8. Automasi Perpustakaan**

Pengembangan pangkalan data perpustakaan *online* merupakan kegiatan mengorganisasikan data dan informasi yang ada di perpustakaan serta di lingkungan MK sehingga menjadi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Perpustakaan MKRI menggunakan katalog online yang disebut dengan SIMPUS yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan dikelola oleh bagian IT MKRI dan Perpustakaan MKRI serta bekerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik).

### 4.3 Kebutuhan informasi peneliti Hakim Konstitusi

Peran seorang peneliti di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari seorang hakim konstitusi. Masing-masing hakim konstitusi memiliki 2 (dua) orang peneliti yang melekat pada hakim. Dalam melakukan pekerjaannya, hakim konstitusi sangat mengandalkan peneliti untuk membuat kajian-kajian, referensi untuk bahan persidangan, membuat bahan makalah, dan lain sebagainya. Setiap putusan yang dibuat oleh hakim, mengacu pada kajian-kajian yang sebelumnya dilakukan peneliti. Maka dari itu, untuk menjalankan fungsinya dengan baik, setiap peneliti membutuhkan informasi yang relevan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Informasi yang dibutuhkan bukan hanya yang terkait dengan masalah konstitusi, tetapi juga informasi dari berbagai hal yang berkaitan dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Chowdhury (1999) bahwa: “Kebutuhan informasi merupakan suatu konsep yang samar. Kebutuhan informasi muncul ketika seseorang menyadari pengetahuan yang ada padanya tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tentang subjek tertentu”.

Agar kebutuhan informasi para peneliti hakim konstitusi dapat diketahui, penulis telah melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) orang informan yang terdiri dari 5 (lima) orang peneliti, 1 (satu) orang supervisor perpustakaan dan 1 (satu) orang pustakawan. Penjelasan mengenai masing-masing profil peneliti, sudah penulis jelaskan di awal.

Sebelum mengetahui peran seperti apa yang sudah dijalankan oleh perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti. Informasi awal yang harus penulis ketahui adalah informasi apa yang paling dibutuhkan oleh para peneliti. Wawancara pertama penulis lakukan oleh peneliti bernama NA. NA merupakan salah satu peneliti yang sudah cukup lama bekerja di Mahkamah Konstitusi. Informan ini berusia sekitar 35 tahun ke atas, penulis hanya mengira-ngira karena penulis tidak menanyakan hal sedetail itu kepada informan. NA memiliki kepribadian yang ramah, kooperatif dalam menjawab pertanyaan dan berpengetahuan luas. Bisa dikatakan ia sering mengunjungi perpustakaan, dan memang penulis sering melihat ia mengunjungi perpustakaan. Dalam wawancara awal, penulis menanyakan mengenai kebutuhan informasi para peneliti di MK, ia menjawab

“Pastinya buku atau literatur-literatur, referensi hukum, undang-undang, dan referensi informasi untuk berbagai perkara yang sedang ditangani MK. Karena perkara yang ditangani MK sangat variatif atau interdisipliner”.

Jawaban yang diberikan oleh NA, sepertinya sudah mewakili jawaban dari peneliti lainnya. Salah satu tugas yang dilakukan oleh peneliti adalah membantu hakim konstitusi untuk membuat kajian perkara.

Mengenai pernyataan tersebut, maka penulis juga menanyakan hal yang sama dengan 4 orang informan lainnya yaitu SU, DA, AL, dan IR. Jawaban yang diberikan mereka ternyata memiliki kesamaan dengan jawaban yang diberikan oleh NA.

Untuk lebih mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkan peneliti, penulis menanyakan hal yang sama kepada DA. DA adalah peneliti yang belum genap 1 tahun bekerja sebagai peneliti di sekretariat hakim. Tetapi, ia merupakan salah satu peneliti yang paling aktif menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi untuk melakukan riset tentang perkara yang sedang ditangani MK. DA merupakan informan yang periang dan memiliki pengetahuan banyak soal perpustakaan. Ketika penulis melakukan wawancara, DA menjawab semua pertanyaan dengan detail. Dari pertanyaan mengenai informasi seperti apa yang dibutuhkan seorang peneliti, ia berkata

“Informasi yang dicari biasanya informasi yang menunjang pekerjaan hakim, seperti membuat kajian perkara. Undang-undang dan turunannya, jurnal, e-book, bahkan buku-buku yang tidak berkaitan dengan hukum saja.”

Sedangkan jawaban dari kedua informan diatas tidak berbeda dengan 3 informan lainnya. Informasi yang peneliti butuhkan bukan sekedar buku yang bersubjek hukum saja, tetapi peneliti juga membutuhkan subjek-subjek lainnya diluar subjek hukum. Seperti yang diungkapkan oleh AL,

“.... subjek selain hukum yang dibutuhkan seperti ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, budaya.”

Untuk lebih menguatkan analisis yang akan penulis lakukan, penulis juga melakukan wawancara dengan pustakawan MK. Menurut informasi dari DE, para peneliti sering meminjam buku-buku yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

“Meraka biasanya mencari informasi dibidang hukum dan undang-undang, Informasi yang berkaitan dengan perkara juga.”

Pendapat ini diperkuat dengan jawaban yang diberikan oleh supervisor perpustakaan, HA. Ia berkata:

“Informasi yang peneliti butuhkan adalah informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan di MK. Peneliti selalu hadir dalam persidangan untuk mengetahui perkembangan persidangan tersebut. Untuk mengetahui kemana arah perkara tersebut bergulir.”

Informasi mengenai buku-buku apa yang paling sering dipinjam peneliti, dapat diketahui melalui daftar peminjaman yang dimiliki perpustakaan MK.

Dari hasil kutipan wawancara diatas mengenai kebutuhan informasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa informasi yang banyak dibutuhkan peneliti selain sumber-sumber primer seperti undang-undang, perda, perpu, dan sebagainya. Peneliti juga membutuhkan buku-buku yang berkaitan dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan, karena MK tidak hanya menangani masalah hukum ketatanegaraan. Pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pilkada, bahkan membubarkan sebuah partai politik juga menjadi wewenang MK. Maka dari itu, dibutuhkan subjek tambahan yang terkait dengan hal tersebut. Penulis juga mengadakan observasi untuk melihat koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Persentase terbesar untuk koleksi memang yang memiliki subjek hukum, terutama hukum tata negara.

Penulis berpendapat bahwa secara keseluruhan, peneliti membutuhkan informasi yang hampir sama subjeknya, yaitu hukum konstitusi. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan informasi yang mereka butuhkan bukan hanya mengenai konstitusi. Demi memperkaya referensi untuk sebuah kajian perkara, dibutuhkan juga informasi mengenai subjek perkaranya. Sementara itu, perpustakaan belum dapat memenuhi koleksi yang mengupas lebih dalam mengenai suatu subjek tertentu. Penjelasan ini merupakan penjabaran mengenai kebutuhan informasi para peneliti hakim konstitusi.

#### 4.4 Sarana Pencarian Informasi Peneliti Hakim Kontstitusi

Informasi memiliki peran yang sangat penting untuk membantu tugas, fungsi, dan kewajiban hakim dan peneliti hakim dalam lembaga yang dipimpinnya. Untuk mencari sebuah informasi, para peneliti membutuhkan berbagai sarana penyedia informasi yang sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan.

Dalam mencari informasi, sebagian besar peneliti hakim menggunakan perpustakaan sebagai sarana utama dalam mendapatkan informasi. Namun, sering kali informasi yang mereka butuhkan tidak terdapat di perpustakaan. Selain itu, mereka juga menggunakan internet sebagai sarana pencarian informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para peneliti, mereka menggunakan beberapa sarana pencarian informasi untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. NA memberikan keterangan mengenai hal tersebut. Ia berkata:

“Sumber informasi yang saya gunakan utamanya berupa buku yang ada di perpustakaan. Kemudian baru internet yang didalamnya terdapat jurnal online yang dilanggan MK. Seperti *westlaw*, *hein online* dan hukum online.”

Dari wawancara yang lebih lanjut, perpustakaan menempati urutan pertama dalam mencari informasi selain internet. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan NA,

“Saya menjadikan perpustakaan sebagai pilihan pertama saya untuk mendapatkan informasi, yang kedua baru saya menggunakan internet.”

Hal yang sama juga diungkapkan SU untuk sumber informasi yang digunakannya. Dari jawaban yang diberikannya, secara tidak langsung ia menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pertama untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Pernyataan yang sama diberikan oleh NA dan SU, yang menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi prioritas. Jawaban yang agak berbeda dengan dua informan di atas diberikan oleh DA. Jawaban DA bisa menjadikan perpustakaan pilihan pertama atau kedua,

“Untuk masalah konstitusi saya menjadikan perpustakaan sebagai *first option*, sedangkan untuk subjek-subjek diluar hukum konstitusi saya menjadikan internet menjadi pilihan pertama. Terkadang untuk satu tema



yang ditangani referensi diperpustakaan kurang komprehensif. Mau tidak mau ya kita harus mencari rujukan di internet. Tapi ya tidak sembarangan referensi juga.”

Jawaban yang sama dengan dua informan awal juga di kemukakan oleh AL dan IR. Untuk menguatkan jawaban dari para peneliti, penulis juga menanyakan sumber informasi apa yang paling sering digunakan peneliti kepada pustakawan MK. DE menjawab:

“Pertama mereka mencari diperpustakaan dulu, kalau gak ada disini, baru mereka ke internet.”

Pernyataan ini dapat dibuktikan dari laporan statistik peminjam yang dimiliki perpustakaan MK.

Beragamnya informasi yang dikemukakan oleh para peneliti mengenai sumber informasi yang mereka biasa gunakan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa perpustakaan adalah sumber utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencari informasi. Namun, ada yang berbeda dengan jawaban salah satu peneliti. Ia menjadikan internet dalam mencari informasi diluar subjek hukum. Internet merupakan salah satu alternatif sumber informasi yang memiliki beberapa keunggulan khususnya dalam hal perkembangan informasi jika dibandingkan dengan perpustakaan. Informasi yang relatif cepat baik dari segi penerimaan maupun *update* informasinya yang menjadi salah satu alasan yang paling banyak digunakan oleh pengguna. Dengan adanya jaringan komputer membuat setiap orang dapat masuk ke sumber-sumber informasi dan data yang ada. Dari 5 (lima) informan yang penulis wawancara, 4 (empat) informan menganggap perpustakaan lebih mampu memenuhi kebutuhan informasi yang mereka butuhkan. Sepanjang observasi yang dilakukan oleh penulis, perpustakaan MK memang sangat memperhatikan kebutuhan penggunanya, terutama kebutuhan hakim dan peneliti.

#### 4.5 Pengembangan koleksi untuk pemenuhan informasi peneliti hakim

Berawal dari pengamatan yang penulis lakukan, penulis beranggapan bahwa kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan hanya diprioritaskan bagi hakim dan peneliti. Maka dari itu, penulis menanyakan prosedur seperti apa yang dilakukan oleh perpustakaan untuk mengembangkan koleksinya. Pengembangan koleksi sangat berkaitan dengan pengadaan koleksi perpustakaan. Pengadaan merupakan kegiatan pokok dari perpustakaan karena kegiatan ini mengusahakan agar buku-buku yang dibutuhkan tersedia dalam koleksi. Menurut Sulistyobasuki, (1991:27) bahwa pengadaan merupakan konsep yang mengacu pada prosedur sesudah kegiatan pemilihan untuk memperoleh dokumen, yang digunakan untuk mengembangkan dan membina koleksi atau himpunan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi serta mencapai sasaran unit informasi.

Sebelum memutuskan pengadaan suatu bahan pustaka, diadakan proses seleksi terlebih dahulu. Seleksi bahan perpustakaan bertujuan untuk menyeleksi bahan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pustakawan harus menentukan bahan pustaka apa yang harus dikoleksi, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Pihak yang terkait dengan proses pengembangan koleksi ini terdiri dari hakim konstitusi, tenaga ahli, peneliti, pemakai internal, dan pemakai eksternal. Pihak-pihak yang disebutkan diatas merupakan pengguna potensial di perpustakaan MK, terutama para peneliti hakim. Perpustakaan MK menganggap bahwa pengembangan koleksi teramat penting sehingga hal tersebut dimasukkan ke dalam *Standard Operasional Prosedure* (SOP) yang isinya sebagai berikut:

1. Pustakawan menerima katalog dari berbagai sumber (penerbit dalam dan luar negeri)
2. Memeriksa permintaan dari *user*
3. Mengumpulkan dan membuat daftar seluruh masukan usulan pengadaan
4. Memeriksa pada daftar catatan dan katalog elektronik untuk mengetahui apakah buku dalam daftar sudah dimiliki atau belum

5. Mendiskusikan untuk mempertimbangkan mengadakan buku yang diminta atau tidak
6. Membuat daftar jadi dan terseleksi
7. Membuat nota dinas kapuslitka
8. Mengusulkan daftar buku final untuk pembelian kepada Sekjen untuk pengadaan koleksi dengan anggaran tahun berjalan
9. Belanja barang melalui lelang
10. Pustakawan menerima barang dan memeriksa.

Dari penjabaran prosedur pengembangan koleksi diatas, dapat lihat bahwa perpustakaan MK tidak sembarangan dalam hal melakukan pengembangan koleksi perpustakaan. Proses seleksi yang panjang dan melibatkan pihak yang menjadi pengguna tetap mereka, menjadikan koleksi di perpustakaan ini benar-benar terseleksi dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Hal tersebut sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh HA,

“Untuk prioritas pengembangan koleksi tetap saja mengandalkan dari peneliti. Perpustakaan ini sangat bekerjasama dengan peneliti untuk pengembangan koleksi. Karena prioritas koleksinya untuk hakim dan peneliti, karena mereka pengguna utama.”

Untuk subjek-subjek yang menjadi perhatian perpustakaan dalam hal pengembangan koleksi, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan apakah koleksi-koleksi yang dimiliki perpustakaan MK sudah mampu memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Jawaban dari NA adalah:

“Ya sudah. Peneliti dilibatkan dalam pengembangan koleksi. Disitulah bentuk kerjasama dan wujud dari upaya-upaya memenuhi kelengkapan informasi yang ada di perpustakaan.”

Sama halnya dengan jawaban NA, informan lainnya juga mengungkapkan hal yang sama. Dari kedua informan tersebut penulis berasumsi bahwa koleksi perpustakaan yang bersubjek hukum memang sudah sangat memadai jumlahnya, tetapi untuk subjek diluar dari hukum dirasakan masih kurang. Asumsi penulis terjawab dengan jawaban yang diberikan oleh IR,

“Masih ada yang kurang tentunya, jadi masih ada yang kita butuhkan itu tidak tersedia di perpustakaan. Ilmu hukum yang dinamis harus diperbaharui. Selain itu, subjek-subjek lain juga perlu.”

Dari berbagai jawaban yang telah diberikan informan diatas, penulis berkesimpulan bahwa koleksi yang dimiliki perpustakaan MK sudah mampu memenuhi kebutuhan penggunaannya. Walaupun ada beberapa subjek yang dirasa masih kurang memadai koleksinya. Penulis juga melakukan pengamatan terhadap koleksi yang ada diperpustakaan. Koleksi bersubjek hukum yang memang menjadi subjek prioritas untuk dikembangkan sudah cukup terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh badan standarisasi nasional mengenai koleksi dasar perpustakaan khusus instansi pemerintahan. “Perpustakaan khusus instansi pemerintahan memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 1000 judul dalam bidang kekhususannya dan sekurang-kurangnya 80% koleksi terdiri dari subjek/disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi induknya.” Dari statistik jumlah koleksi bersubjek hukum yang dimiliki perpustakaan MK, berjumlah 70,47%. Jumlah ini hampir memenuhi ketentuan yang berlaku untuk perpustakaan khusus instansi pemerintahan. Dapat dikatakan, perpustakaan sudah mampu memenuhi kebutuhan penggunaannya, khususnya peneliti.

#### **4.6 Keberadaan perpustakaan di Mahkamah Konstitusi**

Tujuan utama perpustakaan instansi atau perpustakaan lembaga adalah sebagai pusat dokumentasi dan informasi, penelitian dan pengembangan, serta pengolahan data dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pemakainya yang dalam hal ini adalah para staf dan pegawai dari instansi atau lembaga tersebut.

Berangkat dari tujuan utama perpustakaan disebuah instansi atau lembaga yang dijelaskan diatas, penulis juga menanyakan seberapa penting keberadaan perpustakaan di lembaga hukum Mahkamah Konstitusi. Penulis menanyakan kepada semua informan mengenai hal tersebut. Jawaban NA mengenai pertanyaan itu adalah,

“Kalau diskalakan dari 1 – 10, menurut saya mungkin 10, tapi terlalu tinggi, ya tinggi lah pokoknya.”

Jawaban yang sama diberikan oleh SU. Ia menganggap keberadaan perpustakaan sangat penting untuk Mahkamah Konstitusi.

Jawaban yang diberikan oleh AL dan IR, makin menguatkan pentingnya keberadaan perpustakaan di lembaga ini. AL menjawab,

“Penting sekali. Kalau diibaratkan MK tanpa perpustakaan ada “jendela” yang kurang karena perpustakaan ini kan sangat mendukung untuk kita mendapatkan semacam asupan informasi diluar informasi.”

Jawaban DA agak berbeda dengan jawaban empat peneliti lainnya. Dina menjelaskan,

“Untuk kita sebagai peneliti itu penting sekali, kalau diukur 2-3. Karena tergantung dari apa yang kita cari, kalau tentang konstitusi bisa menjadi yang pertama. Tetapi untuk bidang lain atau diluar konstitusi akan mencarinya diinternet.”

Pentingnya keberadaan perpustakaan di lembaga Mahkamah Konstitusi juga dinyatakan oleh jawaban dari HA,

“Sangat penting. Tujuan awal pendirian perpustakaan adalah untuk mempermudah hakim dalam mendapatkan akses informasi dari berbagai sumber. Baik dari dalam maupun luar negeri. Terutama terkait dengan perkara yang sedang ditangani.”

Dari berbagai pernyataan yang diungkapkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Konstitusi saat penting dan eksistensinya sangat dibutuhkan. Sesuai dengan ungkapan dari salah satu peneliti yang mengungkapkan bahwa “Perpustakaan itu ibarat “nafas” nya peneliti untuk menjalankan tugasnya.” Walaupun salah satu informan menganggap perpustakaan dapat diandalkan sepanjang informasi yang dicari berkaitan dengan tema-tema hukum dan konstitusi saja. Akan tetapi, perpustakaan tetap menjadi andalan peneliti untuk mencari informasi yang mereka butuhkan.

#### **4.7 Layanan-layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi peneliti hakim.**

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi termasuk golongan perpustakaan khusus. Layanan informasi yang disediakan oleh perpustakaan khusus merupakan salah satu karakteristik yang membedakan perpustakaan khusus dengan perpustakaan jenis lainnya. Layanan informasi yang diberikan sedapat mungkin harus memudahkan pemakai dalam menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi. Layanan informasi perpustakaan khusus harus disesuaikan dengan kebutuhan pemakai (Prasad, 1992) . Maka dari itu, perpustakaan/lembaga informasi dituntut untuk menyediakan berbagai layanan yang dapat mempermudah pemakaian informasi oleh penggunanya.

Layanan yang dimiliki oleh perpustakaan MK adalah Layanan literatur, ruang baca: Perpustakaan MKRI mempunyai lima jenis ruang baca, yaitu ruang baca hakim, ruang baca umum, ruang baca outdoor, ruang baca doom (bundar), dan ruang audio visual. Layanan internet dan hotspot, layanan sirkulasi mandiri, layanan konsultasi dan diskusi, layanan fotokopi, dan layanan referensi. Layanan informasi yang disediakan oleh perpustakaan khusus merupakan salah satu karakteristik yang membedakan perpustakaan khusus dengan perpustakaan jenis lainnya. Beberapa jenis layanan informasi yang biasanya disediakan perpustakaan adalah layanan peminjaman, pinjam antar perpustakaan, referensi, bibliografis, kesiagaan informasi, terjemahan dan penelusuran online (Prasad, 1992). Menurut *Standard Operasional Prosedure (SOP)* yang dimiliki perpustakaan MK, layanan di dalam perpustakaan MK terbagi menjadi beberapa bentuk layanan, yaitu:

##### **a. Layanan pasif**

Layanan yang diberikan secara pasif (menunggu), diberikan apabila ada permintaan dari pengguna.

1. Pustakawan menerima permintaan informasi, rujukan langsung dari hakim konstitusi/ tenaga ahli/ peneliti atau pemakai lainnya.
2. Menelusuri informasi melalui katalog online atau langsung menunjukkan pada lokasi koleksi
3. Memberikan koleksi yang diminta kepada pemakai

4. Mencatat koleksi yang diminta apabila ternyata koleksi yang dimaksud belum dimiliki
5. Selanjutnya pustakawan akan mempertimbangkan apakah koleksi yang dimaksud harus segera diadakan atau ditanggguhkan

Waktu yang diperlukan 10 sampai 60 menit

#### **b. Layanan kerja aktif**

Menyiapkan rujukan yang mungkin atau berpeluang dibutuhkan pemakai utama (hakim konstitusi) berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang diperiksa di MK.

1. Pustakawan menerima informasi dari biro APP tentang masuknya perkara
2. Memetakan perkara secara umum untuk dibandingkan dengan referensi yang berpelunag untuk dipakai
3. Mencarikan rujukan dari koleksi yang dimiliki perpustakaan
4. Apabila menemukan referensi yang dimaksud segera diinformasikan kepada hakim konstitusi atau melalui peneliti
5. Apabila tidak ditemukan, segera mencari sumber dari sumber lain seperti di perpustakaan lain atau melalui internet

Waktu yang dibutuhkan 10 menit untuk 1 pustaka

#### **c. Layanan preventif**

1. Menyiapkan referensi/bahan pustaka secara umum yang dianggap berpeluang untuk dipakai
2. Mencatat referensi yang dimaksud untuk ditawarkan kepada pemakai
3. Mencatat respon atas tawaran bahan pustaka kepada pemakai, sebagai pertimbangan pengadaan selanjutnya

Waktunya 20 sampai 60 menit

Penulis juga menanyakan mengenai jasa atau layanan yang diketahui oleh peneliti dan layanan apa yang pernah mereka gunakan. Menurut NA,

“Yang paling sering saya gunakan memang kalau yang konvensional adalah peminjaman buku secara fisik, tapi saya juga selalu membuka perpustakaan online untuk mempermudah pencarian/*searching* kemudian ada juga e-book

dan jurnal online. Terkadang kita juga meminta pustakawan untuk mencarikan buku yang dibutuhkan untuk langsung diberikan kepada hakim.”

Berbeda dengan jawaban dari NA, SU mengetahui beberapa layanan yang dimiliki perpustakaan, seperti layanan fotokopi. Walaupun jarang menggunakan layanan tersebut. Dua informan lainnya mengungkapkan bahwa layanan yang sering mereka gunakan adalah penelusuran koleksi secara online. Selain itu, peneliti juga sering memanfaatkan akses *e-book* yang dimiliki perpustakaan MK.

Penulis menanyakan soal pertanyaan yang sama, mengenai layanan apa yang dimiliki perpustakaan dan diketahui oleh para peneliti. Jawaban dari DA agak berbeda dengan jawaban ke empat informan lainnya,

“Perpustakaan memiliki kesiagaan yang sangat siaga, karena sering kali jika peneliti tidak sempat ke perpustakaan, saya akan berkomunikasi via telepon.”

Selain dengan informan, penulis juga menanyakan kepada pustakawan melalui wawancara mengenai layanan apa saja yang dimiliki perpustakaan dalam menunjang kebutuhan informasi pengguna. DE memberikan jawaban “Pertama layanan sirkulasi, penelusuran informasi, referensi, jurnal online, e-book, fotokopi. Layanan yang paling sering digunakan ya sirkulasi/peminjaman.”

Informasi yang diberikan DE diatas merupakan informasi mengenai layanan perpustakaan secara umum, yang memang harus ada disetiap perpustakaan. Penulis menanyakan pertanyaan yang lebih spesifik mengenai layanan yang bisa diberikan oleh hakim dan peneliti, tetapi tidak disediakan untuk pengguna lain. DE menjawab,

“Peminjaman lewat telepon atau surat, lalu kita antarkan keruangnya, semacam layanan antar atau kurir. Yang mengantarkan biasanya pesuruh, kalau mereka tidak ada ya pustakawannya. Selain itu, kita juga memberikan informasi tercetak mengenai buku-buku baru, soalnya kalau melalui email suka tidak dibaca.”

Pernyataan ini penulis buktikan dengan pengamatan selama berada di perpustakaan MK. Pustakawan dengan sigap melayani permintaan buku jika ada permintaan dari hakim maupun peneliti. Terkadang pustakawan juga langsung mengantarkannya ke ruang kerja hakim. Hal ini penulis buktikan sewaktu penulis



melakukan observasi. Beberapa kali penulis membantu pustakawan mencari buku yang dibutuhkan oleh peneliti maupun hakim.

Dari berbagai jawaban informan yang sudah penulis jabarkan diatas, sepertinya peneliti hanya mengetahui sedikit layanan yang dimiliki perpustakaan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai layanan yang dimiliki perpustakaan. Melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan yang paling sering dan banyak digunakan oleh pengguna adalah layanan peminjaman dan penelusuran online. Penelusuran online banyak digunakan mungkin karena alasan peneliti tidak perlu datang langsung ke perpustakaan. Namun, mereka dapat mengetahui dengan cepat buku apa saja yang mereka butuhkan dan dapat langsung meminta buku tersebut kepada pustakawan, lalu diantar ke ruang kerja masing-masing.

#### **4.7.1 Abstraksi**

Abstraksi adalah bentuk informasi yang disajikan dalam laporan atau karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis secara teknis dengan tujuan agar pembaca segera mengetahui isi yang ditulis secara singkat. Dengan kata lain, pengertian abstraksi adalah uraian singkat tapi tetap akurat mengenai isi dokumen dari karya ilmiah tersebut tanpa ditambahi dengan kritik dan sebagainya. Biasanya abstraksi terletak di halaman depan dan berisi rangkuman dari isi karya ilmiah tersebut atau karangan singkat. Dengan adanya abstraksi pembaca dapat mendapatkan informasi tanpa harus membaca isi keseluruhan dari karya tersebut. Abstraksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Abstrak indikatif adalah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah lengkapnya. Abstrak ini bertujuan agar pembaca mengetahui isi informasi tanpa harus memadatkan isi informasi aslinya dan hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan. Dengan ini pembaca dapat mempertimbangkan masih perlu atau tidak membaca naskah aslinya.
2. Abstrak informatif adalah miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak

perlu lagi membaca tulisan aslinya, kecuali untuk mendalaminya. Dalam abstrak ini disajikan keseluruhan datanya dalam bentuk mini.

Dari definisi abstraksi diatas, dapat dikatakan sebuah abstraksi merupakan salah satu informasi yang sangat penting apabila seseorang ingin mengetahui secara singkat isi informasi dari sebuah buku maupun karya ilmiah. Penulis memberikan pertanyaan mengenai produk kemasan informasi apa yang perlu dibuat perpustakaan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan informasinya, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pustakawan dalam mengolah informasi yang sudah ada dengan cara membuat pengemasan ulang informasinya, agar informasi yang terdapat disebuah buku tidak sia-sia. DA menjawab:

“Seperti abstraksi, menurut saya sangat penting sekali. Karena kadang-kadang untuk menelusuri satu referensi dan tahu isinya kita cuma baca abstraksinya. Untuk efisiensi waktu, biar *gak wasting time* aja. Paling tidak dari abstraksi itu kita sudah tahu representasi isi bukunya.”

Jawaban yang diberikan IR hampir sama dengan yang diungkapkan DA. Irfan menjelaskan:

“Perlu sekali, walaupun di perpustakaan online nya sudah terdapat abstraksi, bagi saya masih kurang lengkap, karena ada beberapa informasi-informasi yang perlu kita perdalam lagi. Sehingga dibutuhkan abstraksi yang lebih mendalam. Tidak hanya sebatas luarnya saja.”

Menurut informasi dari pustakawan, DE menjawab,

“Menurut saya abstraksi yang ada diperpustakaan online sudah mencukupi sepertinya.”

Layanan abstraksi memang sudah ada didalam perpustakaan online. Penelusur perpustakaan online bisa melihat abstraksi dari masing-masing buku yang menjadi koleksi perpustakaan MK. Akan tetapi, peneliti menganggap abstraksi yang disediakan perpustakaan masih kurang atau perlu diperdalam lagi penjelasannya. Penulis menyimpulkan, keinginan peneliti adalah abstraksi informatif. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa abstraksi informatif adalah miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap. Sehingga, pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya, kecuali untuk mendalaminya. Dalam abstrak ini disajikan keseluruhan

datanya dalam bentuk mini. Bukan hanya sekedar abstraksi indikatif. Dari kasus tersebut, maka diharapkan perpustakaan lebih mengoptimalkan layanannya pembuatan abstraksi untuk sebuah koleksi. Disinilah, peran pustakawan yang berkompeten sangat dibutuhkan.

#### 4.7.2 Layanan Antar (Delivery Order)

Selain layanan umum yang dimiliki perpustakaan MK, terdapat layanan lain yang hanya dimiliki oleh perpustakaan khusus untuk menunjang kebutuhan informasi peneliti dan hakim, yaitu layanan antar (*Delivery Order*). Layanan ini dilakukan apabila hakim atau peneliti meminta koleksi yang mereka pinjam diantarkan langsung ke ruang kerja peneliti. Sebelum pustakawan melakukan layanan ini, peneliti sudah mengetahui koleksi apa yang mereka akan pinjam dengan melihat katalog online perpustakaan. Terkadang, peneliti tidak perlu mencari judul dan nomor panggil dari koleksi yang mereka inginkan. Cukup dengan menyebutkan subjek dari buku yang diinginkan kepada pustakawan, lalu pustakawan akan langsung mencari kan buku yang memiliki subjek yang saling berkaitan dengan yang diminta oleh peneliti. Layanan antar ini merupakan layanan khusus yang menjadi ciri dari perpustakaan khusus dengan perpustakaan lainnya.

Dari wawancara mengenai layanan khusus ini, beberapa peneliti sudah ada yang mengetahui layanan ini dimiliki oleh perpustakaan dan terkadang juga menggunakan layanan tersebut. Untuk lebih mengetahui apakah layanan tersebut sudah efektif dilakukan oleh perpustakaan. Penulis menanyakan hal tersebut kepada para peneliti. Berdasarkan hasil wawancara, kebanyakan dari mereka mengatakan layanan ini cukup efektif. Seperti jawaban yang dikemukakan oleh SU:

“Biasanya saya meminta tolong kepada teman pustakawan untuk mencarikan buku dengan subjek tertentu, nanti semua yang berkaitan dengan subjek tersebut akan diantarkan kesini.”

Saat penulis menanyakan apakah perpustakaan sudah aktif memberikan layanan yang dibutuhkan, ia menjawab:

“Aktif sih tidak. Tapi kalau misalkan ada buku baru di perpustakaan, saya bisa tahu mana buku-buku baru, mana yang tidak.”

Secara keseluruhan, jawaban yang diberikan peneliti menganggap layanan antar ini sudah efektif dilakukan oleh perpustakaan. Jika peneliti membutuhkan informasi yang mereka butuhkan, pustakawan melayani dengan sigap dan terkadang langsung mengantarkannya ke ruang kerja masing-masing peneliti. Jawaban yang diberikan peneliti, diungkapkan juga oleh pustakawan. DE mengungkapkan:

“Masalah efektifnya atau tidak kita memberikan layanan, kalau sejauh ini sih belum begitu banyak komplain dari mereka. Sejahter ini berarti kita merasa sudah cukup. Logikanya, jika tidak banyak complain berarti layanan yang kita berikan sudah cukup untuk mereka.”

Pustakawan menganggap layanan yang mereka lakukan sudah cukup maksimal, dengan indikator tidak banyaknya aduan mengenai kurangnya layanan yang dilakukan perpustakaan.

#### **4.7.3 Current Awareness Services (CAS)**

Layanan kesiagaan informasi (*current awareness services*) bertujuan untuk mengarahkan informasi kepada pemakai sehingga informasi yang benar dapat sampai kepada orang yang benar dan waktu yang tepat. Selain itu, layanan ini dilakukan oleh perpustakaan untuk memberitahukan kepada pemakai perkembangan terbaru berkaitan dengan bidang subjek yang mereka tekuni. Layanan dapat berupa buletin, email, maupun abstrak dari buku terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan. Layanan kesiagaan ini diwujudkan dengan memberikan informasi mengenai buku-buku terbaru kepada pengguna perpustakaan khususnya peneliti yang dimiliki perpustakaan email maupun melalui daftar tercetak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pustakawan. DE menjawab,

“Setiap ada buku baru kita berikan hard copy daftar buku barunya. Soalnya kalau melalui email, suka tidak dilihat sama mereka.”

Ada layanan lain yang dirasa perlu dibuat untuk semakin meningkatkan layanan kebutuhan informasi para peneliti. Seperti jawaban yang dikatakan oleh DE,

“Menurut saya perlu, terkait dengan kemasan informasi. Seperti kumpulan artikel tentang suatu perkara atau isu. Sebenarnya itu sangat perlu, tetapi sumber daya kita belum mampu melakukan hal tersebut. Kebutuhan akan hal itu juga belum begitu mendesak.”

Ada beberapa layanan yang akan bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan kebutuhan informasi. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya manusia di perpustakaan hal tersebut menjadi kendala untuk melakukan hal tersebut.

#### **4.7.4 Layanan pinjam antar perpustakaan.**

Layanan pinjam antar perpustakaan merupakan alternatif untuk mengatasi keterbatasan subjek maupun jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan khusus. Selain itu, layanan ini dibuat dengan tujuan memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi para peneliti, perpustakaan MK terkadang meminjam koleksi perpustakaan dari perpustakaan lain. Pertanyaan yang penulis ajukan adalah apabila informasi yang dibutuhkan oleh peneliti tidak terdapat di perpustakaan, apa yang akan dilakukan oleh pustakawan. Mengenai pertanyaan ini, DE menjawab

“Pertama kita terlusur di internet, biasanya kan di internet ada lokasinya lalu kita langsung telepon tempat koleksi itu berada. Setelah itu kita kasih pilihan aja, mau digandakan atau dibeli.”

Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, perpustakaan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Perpustakaan LIPI, Perpustakaan lembaga hukum lainnya, dan perpustakaan perguruan tinggi. Penulis menyimpulkan bahwa perpustakaan MK sangat berusaha memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Dengan adanya layanan ini, maka kemungkinan besar kebutuhan informasi penggunanya dapat dipenuhi.

#### 4.8 Peran perpustakaan MK terhadap kebutuhan informasi peneliti hakim

Untuk mengetahui peran perpustakaan MK dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi pengguna, khususnya peneliti hakim. Hal pertama yang harus penulis ketahui adalah informasi apa yang mereka butuhkan. Setelah mengetahui informasi yang mereka butuhkan, selanjutnya penulis akan mencoba menganalisis peran perpustakaan MK dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti. Mengenali kebutuhan pengguna merupakan hal yang sangat penting untuk perpustakaan, salah satu tugas perpustakaan adalah memenuhi kebutuhan penggunanya. Tujuan perpustakaan khusus adalah untuk mendukung tujuan dan sasaran dari organisasi induk, dimana pustakawan harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap perspektif dan kebutuhan organisasi.

Ide awal pembentukan perpustakaan Mahkamah Konstitusi, perpustakaan memang ditujukan untuk membantu kinerja hakim konstitusi untuk menjalani tugas dan fungsinya sebagai hakim pemutus perkara secara konstitusional. Perpustakaan MK memiliki kebijakan untuk memprioritaskan pengembangan koleksi untuk memenuhi kebutuhan informasi hakim dan peneliti. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada informan, HA. Mengenai latar belakang atau kebijakan yang membuat perpustakaan MK untuk para hakim dan peneliti. Ia menjawab:

“Ketika MK berdiri dan didalamnya terdapat perpustakaan, itu sudah otomatis menjadi *supporting system* institusi MK. Kalo sudah menjadi *supporting system* nya MK ya berarti sudah menjadi *supporting*-nya hakim konstitusi juga.”

Perpustakaan MK yang awalnya didirikan untuk menjadi *supporting system* dari MK diharuskan mempunyai peranan yang besar dalam menyediakan informasi untuk semua masyarakat yang berada di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini khususnya kebutuhan informasi peneliti yang menjadi *supporting system* kinerja hakim konstitusi. Peran yang dilakukan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi organisasi induknya sudah cukup aktif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, peran pustakawan juga sangat penting demi menunjang keberhasilan tersebut.

#### 4.9 Pemenuhan kebutuhan informasi bagi peneliti hakim.

Demi memenuhi kebutuhan informasi kepada setiap penggunanya, dalam hal ini peneliti hakim di Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan kebutuhan informasi tersebut akan sangat berkaitan dengan pemanfaatan layanan yang diberikan perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunanya.

Tujuan utama perpustakaan instansi atau perpustakaan lembaga adalah sebagai pusat dokumentasi dan informasi, penelitian dan pengembangan, serta pengolahan data dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pemakainya yang dalam hal ini adalah para staf dan pegawai dari instansi atau lembaga tersebut.

Untuk mengetahui apakah perpustakaan MK sudah mampu memenuhi kebutuhan penggunanya, khususnya peneliti. Maka, penulis memberikan pertanyaan kepada informan yakni para peneliti mengenai keaktifan perpustakaan dalam menyediakan informasi serta layanan yang dimiliki dan diharapkan dapat menunjang bahkan meningkatkan pemenuhan kebutuhan informasi peneliti.

Pertanyaan yang menyangkut apakah perpustakaan sudah cukup aktif memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, khususnya peneliti. Penulis tanyakan pertanyaan tersebut kepada NA, ia menjawab

“Sudah, bahkan tingkat kecepatannya itu menurut saya cukup tinggi.”

Sedangkan DA menjawab,

“Sejauh ini ya, dilihat dari sisi ketersediaan, sudah sangat sangat aktif, bahkan proaktif.”

IR juga mengungkapkan hal serupa,

“Saya pikir oke. Sudah cukup perpustakaan kita, sewaktu kita butuh buku atau apapun, teman-teman diperpustakaan akan menyediakan.”

Untuk semakin menguatkan analisis mengenai pemenuhan kebutuhan pengguna, khususnya peneliti. Penulis juga memberikan pertanyaan lain mengenai, apabila informasi yang dibutuhkan tidak terdapat di perpustakaan, tindakan apa yang pustakawan lakukan. Penulis mengajukan pertanyaan tersebut kepada SU. SU menjawab:

“Biasanya perpustakaan akan berusaha memenuhi informasi yang diminta, seandainya tidak ada di perpustakaan, biasanya peneliti meminta dimana tempat lain di luar perpustakaan MK yang menyediakan sumber referensi

yang peneliti butuhkan. Mereka akan berusaha memenuhi, minimal memberikan informasi dimana peneliti dapat menemukan buku yang dicari.”

Sedangkan NA memberikan jawaban dengan penjelasan sebagai berikut:

“Biasanya langsung diadakan, mungkin tidak seketika itu juga. Memang hampir jarang buku yang dicari itu tidak ada. Kalau pun misalnya buku yang dicari itu tidak sama persis tapi ada buku-buku yang serupa dengan yang dicari. Contohnya, saya mencari judul buku tentang independensi kekuasaan kehakiman dengan penerbit dan penulis si “A” misalkan. Ternyata tidak ada, yang ada buku tentang independensi kekuasaan kehakiman yang ditulis oleh pengarang dan penerbit yang berbeda. Artinya kebutuhan itu bisa di cover dengan judul yang sama. Apabila buku yang dibutuhkan memang tidak ada, maka akan dilakukan pengadaan secara cepat, diluar pengadaan reguler. Terkadang kita juga bisa membeli buku sendiri.”

Jawaban dari beberapa informan diatas, sesuai dengan yang diungkapkan

DE:

“Kalau buku yang diminta tidak ada dipergustakaan, pertama kita terlusur di internet. Biasanya kan di internet ada lokasinya lalu kita langsung telepon tempat koleksi itu berada. Peneliti kita kasih pilihan untuk pembelian atau pengandaan saja.”

Dilihat dari jawaban yang diberikan para informan, sepertinya perpustakaan sudah berupaya dengan maksimal dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi penggunanya. Penulis menanyakan pertanyaan yang dapat membantu penulis untuk mengidentifikasi peran perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna, khususnya peneliti. Pertanyaan yang diajukan juga menyinggung mengenai koleksi yang telah dimiliki perpustakaan dan layanan yang diberikan perpustakaan guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan informasi peneliti.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dengan para peneliti, penulis dapat menyimpulkan bahwa layanan yang diberikan perpustakaan MK sudah cukup optimal dalam hal memenuhi kebutuhan peneliti. Walaupun, masih ada beberapa bagian yang perlu ditingkatkan atau ditambah. Tugas dan peran pustakawan lah yang sangat memiliki andil yang sangat besar untuk meningkatkan hal tersebut.



Seorang pustakawan perlu mengenal konsep SDI (*Selective Dissemination of Information*). Sampai dengan saat ini, sudah beberapa perpustakaan yang telah mengadopsi praktik penyebaran informasi secara terseleksi ini. *Selective Dissemination of Information* (SDI) adalah layanan yang menginformasikan kepada satu orang atau sekelompok kecil individu tentang literatur penting dan koleksi yang diperlukan dengan segera.” (Ferguson & Mobley, 1984). Untuk menerapkan SDI, dibutuhkan keaktifan pustakawan dengan cara melakukan pencarian melalui internet mengenai referensi atau informasi baru dalam bentuk tercetak maupun tidak tercetak yang sesuai dengan kepentingan pengguna perpustakaan.

Pendapat penulis, secara tidak sadar perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah melakukan hal tersebut. Hanya saja, pustakawan kurang mengetahui istilah tersebut. Namun, perpustakaan sudah menginformasikan koleksi yang mungkin suatu saat akan dibutuhkan oleh para peneliti dengan cara melibatkan peneliti dalam hal pengembangan koleksi atau pengadaan. Sebelumnya pustakawan akan mencari dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai buku yang bersubjek hukum maupun tidak. Selanjutnya pustakawan akan memberikan daftar buku tersebut kepada semua peneliti. Peneliti diperkenankan untuk memilih, bahkan menambahkan buku lainnya untuk diadakan. Dengan cara seperti ini, koleksi yang peneliti butuhkan akan terpenuhi dengan baik.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari analisis dan pembahasan yang sudah penulis jabarkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah berperan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan informasi hakim dan peneliti. Kebutuhan informasi yang dimiliki peneliti secara keseluruhan adalah informasi yang bersubjek hukum. Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka yang melekat kepada hakim konstitusi, dalam membantu kinerja hakim memutuskan suatu perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Selain koleksi yang bersubjek hukum, peneliti juga membutuhkan informasi mengenai subjek-subjek lainnya. Seperti ilmu sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Perkara pengujian undang-undang selain menggunakan undang-undang sebagai sumber utama informasi, peneliti juga membutuhkan informasi mengenai undang-undang yang akan diujikan.

Sarana pencarian informasi yang paling diandalkan oleh para peneliti adalah perpustakaan. Sampai dengan saat ini, peneliti menganggap bahwa perpustakaan sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka. Namun, perpustakaan harus meningkatkan koleksinya karena perkara yang ditangani hakim terus berkembang. selain perpustakaan Peneliti juga menjadikan internet sebagai pilihan lain dalam mencari informasi. Walaupun, beberapa peneliti menganggap internet lebih bisa diandalkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Selain layanan umum yang sudah dimiliki perpustakaan MK, layanan khusus juga dapat ditambah demi meningkatkan layanan yang sudah ada. Layanan yang sudah dimilikinya saat ini perlu ditingkatkan lagi. Layanan yang masih dianggap kurang adalah layanan abstraksi setiap koleksi yang ada diperpustakaan. Layanan lainnya seperti kesiagaan informasi maupun layanan antar sudah berjalan cukup baik, walaupun masih harus ditingkatkan. Sejauh ini, peran perpustakaan sudah dirasakan baik, pustakawannya juga sudah aktif melakukan layanan yang dimiliki perpustakaan. Pengembangan koleksi diluar subjek hukum juga masih harus menjadi perhatian perpustakaan ini.

## 5.2 Saran

Penelitian yang sudah dilakukan penulis menghasilkan analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas. Akan tetapi, penulis masih menemukan beberapa kekurangan yang ada di perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan agar perpustakaan Mahkamah Konstitusi menjadi perpustakaan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki.

1. Koleksi yang membahas mengenai subjek non-hukum, dirasa masih perlu dikembangkan lagi guna memenuhi kebutuhan informasi peneliti. Koleksi di luar subjek hukum harus digali lebih dalam lagi. Setiap subjek harus dibahas secara tuntas.
2. Konten dari perpustakaan online perlu ditingkatkan lagi. Salah satunya dengan memberikan abstraksi yang lebih mendalam untuk membahas sebuah koleksi. Abstraksi yang perlu dibuat berupa abstraksi informatif. Membahas suatu koleksi secara menyeluruh, yang tidak hanya membahas permukaannya saja.
3. Ilmu hukum dari waktu ke waktu yang terus berkembang harus diperhatikan. Informasi yang berkaitan dengan subjek hukum perlu di *update* setiap tahunnya.
4. Pustakawan perlu memahami layanan-layanan khusus yang biasanya dimiliki perpustakaan khusus. Layanan khusus memang sudah dimiliki perpustakaan MK. Akan tetapi, pustakawan belum terlalu memahami teori yang sebenarnya. Maka dari itu, pustakawan harus membekali diri dengan mempelajari layanan-layanan khusus untuk meningkatkan layanan di perpustakaan.
5. Pustakawan mencari informasi dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri secara menyeluruh dan mendalam mengenai koleksi yang berkaitan dengan hukum maupun berkaitan dengan perkara yang ditangani MK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Iyan. (2009). Metode penelitian kualitatif. 19 Januari 2009. Jakarta  
<http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.pdf>
- Badan standarisasi nasional. (2009). Perpustakaan khusus instansi pemerintah.  
[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-ubudiyahse-19343-6-27467\\_sn-9.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-ubudiyahse-19343-6-27467_sn-9.pdf)
- Bagong Suyanto, dkk. (Editor). (1991). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Black, James A. (1999). *Metode dan masalah penelitian sosial*. Bandung: Refika.
- Brittin, Margaret (Editor). (1992). *Information Technology in Special Libraries*. London: Routledge.
- Bungin, Burhan. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chowdury, G.G. (1999). *Introduction to modern information retrieval*. London: library Association Publishing.
- Creswell, John W. (1994). *Research design quantitative & qualitative approaches*. California: SAGE Publication.
- Ferguson, Elizabeth and Emily R. Mobley. (1984). *Special libraries at Work*. Connecticut: Library Profesional Publication.
- Hartono, Jogyanto. (2000). *Pengenalan komputer*. Yogyakarta.
- Hermawan, Rachman, dan Zulfikar Zen. (2006). *Etika Kepustakawanan: suatu pendekatan terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung seto.
- <http://jus.web.id/pengertian-abstraksi-karya-ilmiah.html>. Pengertian Abstraksi Karya Ilmiah May 12th, 2011

Ishak. (2006). *Kebutuhan informasi mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) FK-UI dalam memenuhi tugas journal reading*. Jurnal Pustaka: Sistem perpustakaan dan Informasi No.2 (Vol.2) Desember 2006

Javerlin, K dan Wilson T.D. (2003). *On Conceptual Models for Information Seeking and Retrival Research*.

Joan M. Reitz. ODLIS: Online dictionary for library and information science. [http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis\\_s.aspx](http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx)

Patilima, Hamid. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Prasad, H.N. (1992). *Information needs and user*. Varanasi: Indian bibliographic centre.

Putubuku. (2008). *Informasi: dibutuhkan, diinginkan, diperlukan*. Oktober 2008. <http://iperpin.wordpress.com/2008/10/11/informasi-dibutuhkan-diinginkan-diperlukan/>

Sankarto, Bambang S.dan Permana, Maman. (2008). *Identitas Kebutuhan Informasi Melalui Teknik Pengamatan, Wawancara dan Angket*. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Program Meningkatkan Pendapat Petani Melalui Inovasi (P4MI) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Singh, S.P. (2006). *Special libraries in India: some current trends*. May, 19, 2006. University of Delhi, Department of Library and Infromatio Science. <http://emeraldinsight.com>

Sugiyono. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo-Basuki. (1991). *Pengantar ilmu perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_. (1993). *Pengantar ilmu perpustakaan*. Jakarta: Universitas terbuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

\_\_\_\_\_. (1994). *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya.

\_\_\_\_\_. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

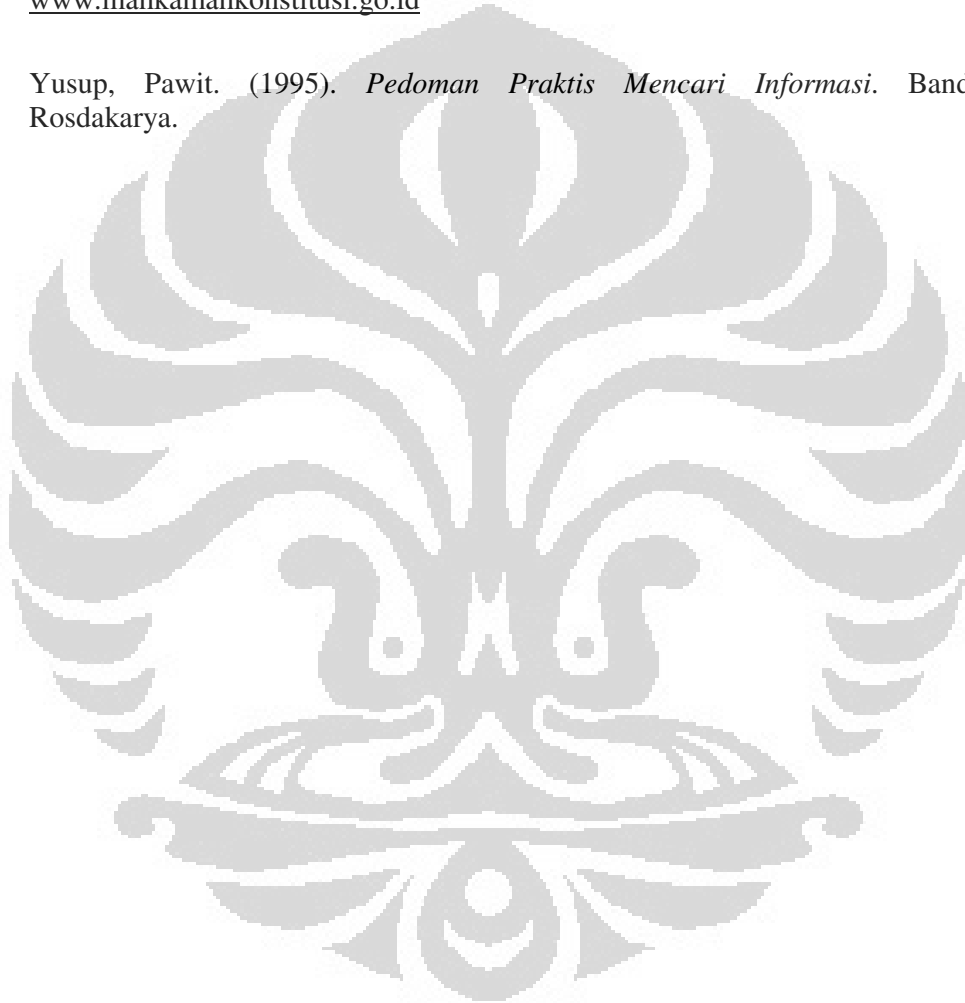
Sumardji, P. (1992). *Pelayanan referensi di perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Surachman, Arif. *Pengelolaan perpustakaan khusus*.  
<http://arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/Manpersus.doc>

Sutarno. NS. (2006). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto.

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Yusup, Pawit. (1995). *Pedoman Praktis Mencari Informasi*. Bandung: Rosdakarya.



**PANDUAN WAWANCARA  
(INTERVIEW GUIDELINES)**

**A. Peneliti Hakim**

1. Profil peneliti hakim
2. Kebutuhan informasi peneliti hakim
3. Sarana pencarian kebutuhan informasi
4. Pandangan mengenai keberadaan perpustakaan di Mahkamah Konstitusi
5. Pengembangan koleksi untuk peneliti hakim
6. Peran perpustakaan MK dalam memenuhi kebutuhan informasi peneliti hakim

**B. Supervisor Perpustakaan**

1. Peran perpustakaan dalam lingkungan instansi pemerintahan
2. Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan untuk peneliti hakim

**C. Pustakawan**

1. Profil perpustakaan Mahkamah Konstitusi
2. Layanan perpustakaan
3. Jenis dan jumlah koleksi perpustakaan Mahkamah Konstitusi

## Lampiran 2 Matriks Wawancara

## MATRIKS WAWANCARA

## 1. Informasi apa yang paling dibutuhkan oleh peneliti hakim?

No.	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Nalom <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 14.00- 15.00	Pastinya buku atau literatur-literatur, referensi-referensi hukum yang ada di perpustakaan. Referensi yang berkaitan dengan hukum atau di luar dari hukum jika dibutuhkan. Karena sangat variatif atau interdisipliner dari perkara, dari bermacam-macamnya perkara itu lah perlunya banyak variasi buku-buku atau referensi untuk membantu hakim memeriksa, memutus, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.	Buku, Referensi hukum.	Peneliti membutuhkan literatur dan referensi hukum untuk menjang tugas mereka dalam membantu hakim menyelesaikan suatu perkara.
2	<b>Informan:</b> Sukri <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.50- 14.40	Informasi dari perpustakaan tentunya referensi hukum, terkait dengan isu-isu konstitusi, kalau seumpamanya kita punya perkara, untuk pendalaman materinya. Karena perkara konstitusi memiliki aspek yang luas, tidak melulu aspek hukum ketatanegaraan, bisa juga buku-buku tentang hukum bisnis. Artinya bisa juga untuk menambah pengetahuan. Tapi khususnya yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Khususnya informasi yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK.	Referensi hukum, isu-isu konstitusi.	Selain subjek hukum, peneliti juga membutuhkan informasi lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
3	<b>Informan:</b> Ali <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 27 April 2012 <b>Pukul:</b> 13.30- 14.00	Berupa buku-buku atau jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perkara yang diujikan oleh MK. Subjek selain hukum yang dibutuhkan seperti ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, budaya. Karena pengujian undang-undang di MK itu luas yang tidak hanya hukum, tapi lintas keilmuan.	Informasi terkait subjek-subjek ilmu lainnya.	Subjek non-hukum sangat diperlukan oleh para peneliti.
4	<b>Informan:</b> Dina <b>Tempat:</b>	Kalau dilihat dari tugas peneliti yang menjadi supporting staf hakim otomatis akan berkaitan dengan hal membantu hakim. Dalam hal ini setiap peneliti yang melekat ke hakim biasanya	Jurnal, e-book	Informasi yang berasal dari non-buku, juga penting demi menunjang



	Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-16.00	berkaitan dengan tugas pokok peneliti membuat kajian perkara, menyusun pendapat hakim, membantu membuat makalah dengan mengumpulkan referensi. Untuk mencari bahan-bahan tersebut, tidak jauh-jauh dari perpustakaan karena disini pusatnya. Yang berkaitan dengan buku, tetapi ada juga selain buku, seperti jurnal, e-book atau yang berkaitan dengan hukum konstitusi, Undang-undang dan turunannya, seperti PP.		pekerjaan para peneliti.
5	<b>Informan:</b> Irfan <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-15.30	Informasi yang paling dasar itu terkait dengan peraturan, perundang-undangan, sampai peraturan yang ada dibawahnya atau turunannya. Dalam memutuskan perkara, MK juga harus memperhatikan peraturan yang ada dibawah undang-undang agar keputusannya bersifat komprehensif. Yang kedua buku-buku ilmiah/akademisi juga dibutuhkan, makalah, jurnal merupakan yang selanjutnya selain undang-undang. Buku-buku yang terkait dengan perkara juga dibutuhkan.	Undang-undang dan turunannya. Buku-buku ilmiah, makalah, jurnal.	Buku-buku ilmiah yang membahas subjek mengenai perkara dibutuhkan oleh peneliti.
6	<b>Informan:</b> Dewi, Pustakawan. <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 3 Mei 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-14.35	Meraka biasanya mencari informasi dibidang hukum dan undang-undang. Kita menyiapkan undang-undang itu karena perkara di MK biasanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Subjek hukum tatanegara dan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Informasi yang berkaitan dengan perkara juga.	Bidang hukum, undang-undang.	Pustakawan mengetahui informasi apa yang paling sering dibutuhkan oleh peneliti, melalui daftar peminjaman/sirkulasi.
7	<b>Informan:</b> Hanindyo, Supervisor Perpustakaan <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 30 April 2012 <b>Pukul:</b> 14.30-15.00	Informasi yang mereka butuhkan yang berkaitan dengan perkara yang sedang mereka sidangkan. Misalnya tentang mineral dan gas bumi, yang berkaitan dengan perkara yang mereka sedang tangani lah. Untuk bahan-bahan pertimbangan keputusan hakim. Intinya, informasi yang mereka butuhkan ya terkait dengan pekerjaan mereka sebagai peneliti.	Informasi penunjang pertimbangan keputusan hakim.	Selain dengan pustakawan, peneliti juga sering berinteraksi langsung dengan supervisor untuk mencari informasi yang mereka butuhkan.

2. Sarana informasi seperti apa yang digunakan oleh peneliti dalam mencari informasi yang dibutuhkan?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<p><b>Informan:</b> Nalom</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 14.00-15.00</p>	<p>Beberapa yang utamanya berupa buku, tapi perpustakaan juga punya e-book, kemudian ada juga akses internet, termasuk didalamnya ada westlaw, hein online, ada juga hukum online. Itu yang memudahkan pekerjaan peneliti yang mendukung tugas dalam rangka menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh hakim. Jadi peran dari perpustakaan itu sendiri sangat vital, sehingga update buku setiap tahun menjadi perhatian khusus bagi sekretariat jenderal khususnya. Peneliti bisa memberikan masukan terhadap referensi, termasuk penyedia/ provider bahan-bahan hukum, jurnal online, dan sebagainya. Untuk memperkaya pengetahuan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Saya menjadikan perpustakaan sebagai pilihan pertama saya untuk mendapatkan informasi, yang kedua baru saya menggunakan internet.</p>	<p>Buku, e-book, internet, jurnal online.</p>	<p>Sarana yang sering digunakan oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan informasi adalah perpustakaan.</p>
2	<p><b>Informan:</b> Sukri</p> <p><b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.50-14.40</p>	<p>Selain buku di perpustakaan, yang merupakan tempat untuk menyimpan berkas-berkas perkara seperti risalah, putusan sidang, yang meskipun di website MK juga sudah dipublikasikan. Kalau internet, karena disini sudah tersambung oleh internet jadi saya rasa tidak perlu ke perpustakaan juga, westlaw, hein online, itu semua sudah tersambung masing-masing bagian di kantor ini sudah bisa tanpa harus ke perpus. E-book juga penting yang memudahkan pengguna. Walaupun begitu, saya tetap menjadikan perpustakaan sebagai pilihan pertama, internet jadi <i>second option</i> lah.</p>	<p>Jurnal online, e-book.</p>	<p>Peneliti mengandalkan koleksi lain perpustakaan selain buku, yaitu jurnal online dan e-book.</p>
3	<p><b>Informan:</b> Ali</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> 27 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 13.30-14.00</p>	<p>Sumber informasinya website. Kita lebih memilih datang ke perpustakaan dahulu yang merupakan <i>supporting</i> atau pusat kajian. Jadi yang paling pertama kita cari adalah perpustakaan dulu, kalo tidak ada baru ke internet, kalau tidak ada juga baru kita mencarinya diperpustakaan lain. Yang diutamakan adalah perpustakaan dulu, karena koleksinya sudah cukup banyak.</p>	<p>Website, perpustakaan.</p>	<p>Perpustakaan dijadikan tempat pertama mencari informasi, apabila perpustakaan tidak mempunyai koleksi yang dicari, peneliti mencarinya di perpustakaan lain.</p>
4	<p><b>Informan:</b></p>	<p>Sekarang kan teknologi ada dimana-mana,</p>	<p>Internet,</p>	<p>Internet dijadikan</p>

	Dina <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-16.00	terkadang untuk satu tema yang ditangani tetapi referensi perpustakaan kurang komprehensif. Mau tidak mau kita harus mencarinya rujukannya di internet dan rujukan yang dipakai pun tidak sembarangan karena akan dipakai sebagai bibliografi atau daftar pustaka dalam makalah hakim. Kita akan memakai jurnal-jurnal yang ada kaitannya, misalnya jurnal-jurnal negarawan, jurnal konstitusi, kalo gak ada juga kita tetap mencari ditempat lain. Untuk masalah konstitusi saya menjadikan perpustakaan sebagai <i>first option</i> , sedangkan untuk subjek-subjek diluar hukum konstitusi saya menjadikan internet menjadi pilihan pertama.	jurnal online bersubjek hukum.	sarana pencarian informasi yang utama jika informasi yang dicari tidak terkait dengan masalah hukum konstitusi.
5	<b>Informan:</b> Irfan <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-15.30	Paling utama ya buku, bisa online atau yang konvensional atau hard copy nya. Perpustakaan menjadi pilihan yang pertama, baru kemudian internet.	Buku online (e-book), hardcopy	Perpustakaan digunakan untuk mencari informasi yang berbentuk buku.
6	<b>Informan:</b> Dewi, Pustakawan. <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 3 Mei 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-14.35	Pertama mereka mencari di perpustakaan dulu, karena perpustakaan kan pendukung pekerjaannya mereka dalam hal memenuhi kebutuhan informasi. Kalau gak ada disini, baru mereka ke internet. Tugas mereka kan tidak hanya mengkaji perkara saja, tetapi ada juga tugas-tugas lainnya. Kepentingan itu lah maka mereka mencarinya di internet.	Perpustakaan, internet.	Perpustakaan sangat diandalkan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan hukum konstitusi. Akan tetapi, jika subjek yang dicari diluar subjek hukum, peneliti lebih mengandalkan internet.

### 3. Seberapa penting keberadaan perpustakaan di Mahkamah Konstitusi?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Nalom	Kalau diskalakan dari 1 – 10, menurut saya mungkin 10, tapi terlalu tinggi, ya tinggi lah	Penting. Referensi,	Keberadaan perpustakaan

	<p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 14.00- 15.00</p>	<p>pokoknya, karena pengetahuan manusia dari mana kalau sumbernya tidak dari perpustakaan. Seperti referensi, media online, dll. Sehingga manusia menjadi pintar itu karena ada informasi, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa “orang yang sukses adalah orang yang menguasai informasi”.</p>	<p>media online.</p>	<p>dirasakan sangat penting sebagai sumber informasi.</p>
2	<p><b>Informan:</b> Sukri</p> <p><b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.50- 14.40</p>	<p>Mungkin kalau skala dari 1-10 saya memberikan angka 9 (sembilan) karena sangat penting, pokoknya sangat penting. Hampir sempurna, tapi tidak sempurna karena perpustakaan hanya penunjang. Tetapi jika informasi yang saya inginkan tidak ada diperpustakaan, saya mencarinya di internet. Internet saya jadikan <i>second option</i> untuk mendapatkan informasi.</p>	<p>Sangat penting. Second option, internet.</p>	<p>Perpustakaan dianggap hampir sempurna sebagai penunjang pekerjaan dan tugas peneliti.</p>
3	<p><b>Informan:</b> Ali</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> 27 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 13.30- 14.00</p>	<p>Penting sekali. Kalau diibaratkan MK tanpa perpustakaan ada jendela yang kurang karena perpustakaan ini kan sangat mendukung untuk kita mendapatkan semacam asupan informasi diluar informasi yang sudah ada. Informasi awal dari internet, tapi untuk <i>hardcopy</i> nya kita dapatkan disini.</p>	<p>Penting sekali.</p>	<p>Keberadaan perpustakaan diandalkan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk tercetak.</p>
4	<p><b>Informan:</b> Dina</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.00- 16.00</p>	<p>Untuk kita sebagai peneliti itu penting sekali, nilainya kalau diukur 2-3 lah. Karena tergantung dari apa yang kita cari, kalau tentang konstitusi bisa menjadi yang pertama. Tetapi untuk bidang lain atau diluar konstitusi akan mencarinya diinternet.</p>	<p>Penting sekali.</p>	<p>Perpustakaan sangat penting sebagai sumber hukum konstitusi.</p>
5	<p><b>Informan:</b> Irfan</p> <p><b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim</p> <p><b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.00- 15.30</p>	<p>Penting sekali buat MK, karena MK memiliki ciri khas sendiri sebagai peradilan ketatanegaraan yang keputusan-keputusannya bersifat ilmiah, karena terkait dengan undang-undang.</p>	<p>Penting sekali.</p>	<p>Perpustakaan sebagai penunjang hakim untuk memutuskan perkara dengan baik.</p>

6	<p><b>Informan:</b> Hanindyo, Supervisor Perpustakaan</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> 30 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 14.30- 15.00</p>	<p>Sangat penting. Dari awal pendirian perpustakaan adalah untuk mempermudah hakim dalam mendapatkan akses informasi dari berbagai sumber. Baik dari dalam maupun luar negeri. Terutama terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Maka dari itu, perlu banyak referensi. Jika kita tidak memiliki perpustakaan tapi referensinya mau banyak ya sangat tidak mungkin. Sekalipun disetiap ruang kerja hakim kita sediakan juga koleksi tertentu untuk mereka gunakan, hakim juga punya koleksi sendiri.</p>	<p>Sangat penting. Sumber referensi.</p>	<p>Perpustakaan memiliki peran yang besar untuk mendapatkan akses informasi bagi penggunaanya. Referensi yang terdapat di perpustakaan harus semakin berkembang.</p>
---	--	---	--	--

#### 4. Koleksi perpustakaan apa saja yang sering digunakan?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<p><b>Informan:</b> Sukri</p> <p><b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.50- 14.40</p>	<p>Koleksinya ya tentunya buku-buku hukum, tata negara. Kemudian hukum-hukum perbandingan. Yang paling sering digunakan buku hukum.</p>	<p>Buku-buku hukum, tata Negara.</p>	<p>Koleksi yang sering digunakan merupakan buku-buku yang berkaitan dengan fungsi peneliti di Mahkamah Konstitusi.</p>
2	<p><b>Informan:</b> Nalom</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 14.00- 15.00</p>	<p>Tentunya kalau untuk peneliti-peneliti hakim, referensi yang paling bermanfaat adalah referensi yang berkaitan dengan hukum, tapi karena variasi dari perkara yang ditangani MK sangat beragam. Akhirnya peneliti mau tidak mau harus membuka wawasan terhadap ilmu-ilmu lainnya. Misalnya, ketika ada pengujian UU mengenai sistem ekonomi menurut Pasal 33, akhirnya kita sedikit banyak membuka atau membaca referensi tentang ekonomi, meskipun kita mengamati informasi itu dan melakukan klarifikasi dengan sebuah forum diskusi <i>focus group discussion</i>. Sehingga di perpustakaan tidak hanya buku-buku tentang hukum saja, buku yang lain pun ada, buku agama contohnya.</p>	<p>Referensi hukum dan ilmu lainnya.</p>	<p>Koleksi yang digunakan bukan hanya yang berkaitan dengan hokum. Tetapi, koleksi yang berkaitan dengan perkara yang sedang dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi.</p>
3	<p><b>Informan:</b> Ali</p>	<p>Saya sering menggunakan koleksi yang ada kaitannya dengan konstitusi, politik, ya seputar</p>	<p>Hukum konstitusi,</p>	<p>Koleksi tentang perbandingan</p>

	<b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 27 April 2012 <b>Pukul:</b> 13.30- 14.00	itu lah. Saya lebih sering menggunakan buku tentang perbandingan konstitusi.	politik.	konstitusi diberbagai Negara merupakan koleksi yang sering digunakan peneliti.
4	<b>Informan:</b> Dina <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00- 16.00	Ada beberapa koleksi yang tidak berkaitan dengan konstitusi tetapi ada diperpustakaan ini. Bagi saya cukup membantu, contohnya mengenai hukum agama. Selain itu yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK.	Koleksi yang tidak berkaitan dengan konstitusi.	Peneliti membutuhkan koleksi yang terkadang tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah hukum
5	<b>Informan:</b> Irfan <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00- 15.30	Buku-buku yang berkaitan dengan hukum, undang-undang dasar yang menjadi dasar perbandingan untuk memutuskan perkara pengujian undang-undang.	Buku-buku hukum.	Koleksi buku-buku hukum sangat sering digunakan untuk membantu peneliti memberikan referensi kepada hakim dalam memutuskan perkara.

5. Layanan apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan Mahkamah Konstitusi, yang Anda ketahui?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Sukri <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.50- 14.40	Kalau kita foto copy, biasanya Hakim minta untuk foto copy berkas perkara, karena hal itu membutuhkan waktu yang cepat. Dalam satu hari itu juga, dan biasanya yang difoto copy adalah buku yang jarang dijual di luar. Ada hakim yang menemukan dan minta untuk di copy kan. Kalau saya kurang sering menggunakannya. Biasanya saya meminta tolong kepada teman pustakawan untuk mencarikan buku dengan subjek tertentu, nanti semua yang berkaitan dengan subjek tersebut akan diantarkan kesini. Pustakawan disana sangat sigap melayani peneliti. Informasi yang dibutuhkan akan diberikan saat itu juga.	Foto copy, layanan antar.	Peneliti hanya mengetahui beberapa layanan yang dimiliki perpustakaan.

2	<p><b>Informan:</b> Nalom</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 14.00- 15.00</p>	<p>Yang paling sering saya gunakan memang kalau yang konvensional adalah peminjaman buku secara fisik, tapi saya juga selalu membuka perpustakaan online untuk mempermudah pencarian/<i>searching</i> kemudian ada juga e-book dan jurnal online. Terkadang kita juga meminta pustakawan untuk mencarikan buku yang dibutuhkan untuk langsung diberikan kepada hakim.</p>	<p>Peminjaman, penelusuran online.</p>	<p>Layanan yang sering digunakan peneliti adalah peminjaman dan penelusuran online.</p>
3	<p><b>Informan:</b> Ali</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> 27 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 13.30- 14.00</p>	<p>Layanan penelusuran online, akses e-book, apabila saya mengunjungi website lembaga lain, mereka tidak memberikan akses untuk membuka e-book nya. Tapi disini diizinkan. Yang paling sering saya gunakan ya perpustakaan online itu.</p>	<p>Penelusuran online, akses e-book.</p>	<p>Selain penelusuran online, peneliti mengandalkan akses e-book untuk pemenuhan informasi mereka.</p>
4	<p><b>Informan:</b> Dina</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.00- 16.00</p>	<p>Perpustakaan memiliki kesiagaan informasi yang sangat siaga, karena sering kali jika peneliti tidak sempat ke perpustakaan, saya akan berkomunikasi via telepon. Saya cukup dengan membawa kata kunci atau subjek saja, pustakawan akan sangat membantu untuk mencarikan informasi yang saya butuhkan. Memang tidak benar-benar persis dengan yang dicari, tetapi yang memiliki kaitan dengan subjek tersebut. Buku tersebut juga akan diantarkan kepada kita.</p>	<p>Kesiagaan informasi</p>	<p>Dina mengetahui salah satu layanan khusus dari perpustakaan.</p>
5	<p><b>Informan:</b> Irfan</p> <p><b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim</p> <p><b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.00- 15.30</p>	<p>Layanan yang sering saya gunakan penelusuran informasi online.</p>	<p>Penelusuran online</p>	<p>Penelusuran online paling sering diandalkan oleh peneliti.</p>
6	<p><b>Informan:</b> Dewi, Pustakawan.</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b></p>	<p>Pertama layanan sirkulasi, penelusuran informasi, referensi, jurnal online, e-book, fotokopi. Layanan yang paling sering digunakan ya sirkulasi/peminjaman. Peminjamannya bisa lewat telepon atau surat, lalu kita antarkan keruangnya. Yang</p>	<p>Layanan umum di perpustakaan. Beberapa layanan</p>	<p>Layanan antar dilakukan apabila peneliti tidak sempat ke perpustakaan untuk meminjam koleksi secara</p>

3 Mei 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-14.35	mengantarkan biasanya pesuruh, kalau mereka tidak ada ya pustakawannya. Setiap ada buku baru kita berikan hard copy daftar buku barunya. Soalnya kalau melalui email, suka tidak dilihat sama mereka.	khusus perpustakaan	langsung.
---	---	---------------------	-----------

6. Apakah perpustakaan sudah cukup aktif dalam memberikan layanan yang dibutuhkan?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Sukri <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.50-14.40	Aktif sih tidak, tapi pada dasarnya karena kita instansi milik pemerintah, jika ada pengadaan buku-buku baru, maka sebelumnya kita adakan lelang. Peneliti itu biasanya disuruh menulis buku-buku apa saja yang sekiranya dibutuhkan. Tapi kalau misalkan ada buku baru di perpustakaan, saya bisa tahu mana buku-buku baru, mana yang tidak. Peneliti biasa dilibatkan.	Aktif	Peneliti sudah diikuti melibatkan dalam hal pengembangan koleksi di perpustakaan.
2	<b>Informan:</b> Nalom <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-15.00	Sudah, bahkan tingkat kecepatannya itu menurut saya cukup tinggi, karena kemudahan dalam mencarinya juga digolongkan efektif sehingga layanannya cepat, yang menjadi kendala teknisnya kan karena dibutuhkan waktu proses pencarian bahan, ketika proses pencariannya mudah, maka layanannya juga akan cepat.	Keaktifannya tinggi.	Proses pencarian informasi yang cepat akan semakin membuat layanan di perpustakaan semakin baik.
3	<b>Informan:</b> Ali <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 27 April 2012 <b>Pukul:</b> 13.30-14.00	Ya, sudah cukup aktif. Jika kita menghubungi secara via telepon atau online, pustakawannya sudah cukup paham dan memberikan layanan yang cepat. Terutama ketika hakim yang meminta mereka akan sangat cepat menanggapi.	Cukup aktif	Pustakawan sudah memahami kebutuhan informasi peneliti.
4	<b>Informan:</b> Dina <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012	Sejauh ini ya, dilihat dari sisi ketersediaan, sudah sangat sangat aktif, bahkan proaktif. Proaktif dalam artian kita cukup mempunyai kata kunci untuk informasi yang dibutuhkan, mereka akan mencarinya bahkan langsung mengantarkannya ke saya. Kalau ada buku-buku baru akan langsung terlihat dengan	Proaktif	Ketersediaan informasi membuat layanan di perpustakaan menjadi prima.



	<b>Pukul:</b> 15.00-16.00	diletakkan ditempat yang bisa langsung terlihat.		
5	<b>Informan:</b> Irfan <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-15.30	Saya pikir oke. Sudah cukup perpustakaan kita, sewaktu kita butuh buku atau apapun, teman-teman diperpustakaan akan menyediakan. Terkadang mereka juga bisa mengantarkannya kesini.	Aktif	Perpustakaan sudah cukup menyediakan informasi yang dibutuhkan peneliti.
6	<b>Informan:</b> Dewi, Pustakawan. <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 3 Mei 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-14.35	Kalau sejauh ini sih belum begitu banyak komplain dari mereka. Sejauh ini berarti kita merasa sudah cukup. Logikanya, jika tidak banyak <i>complain</i> berarti layanan yang kita berikan sudah cukup untuk mereka. Peran kita untuk pengembangan koleksinya dalam hal seleksi buku, mereka dilibatkan secara langsung untuk hal penyeleksian koleksi. Kalau ada koleksi baru kita sebar kan daftarnya ke mereka.	Aktif	Untuk penyeleksian koleksi, peneliti diikut libatkan demi mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

7. Apabila informasi yang dibutuhkan tidak terdapat di perpustakaan, apa yang biasanya pustakawan lakukan? Bagaimana cara peneliti mencari informasi yang dibutuhkan?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Sukri <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.50-14.40	Biasanya perpustakaan akan berusaha memenuhi informasi yang diminta, seandainya tidak ada di perpustakaan, biasanya peneliti meminta dimana tempat lain di luar perpustakaan MK yang menyediakan sumber referensi yang peneliti butuhkan. Mereka akan berusaha memenuhi, minimal memberikan informasi dimana peneliti dapat menemukan buku yang dicari, seperti itu. Biasanya kalau untuk kebutuhan informasi hakim, pasti harus diadakan.	Informasi dimana koleksi berada.	Pustakawan berusaha mengetahui lokasi dari koleksi yang dibutuhkan berada.
2	<b>Informan:</b> Nalom <b>Tempat:</b>	Biasanya langsung diadakan, mungkin tidak seketika itu juga. Memang hampir jarang buku yang dicari itu tidak ada. Kalau pun misalnya buku yang dicari itu tidak sama persis tapi ada	Informasi dengan alternative lain.	Koleksi yang diberikan tidak sama persis, tetapi peneliti diberikan alternative

	Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-15.00	buku-buku yang serupa dengan yang dicari. Contohnya saya mencari judul buku tentang independensi kekuasaan kehakiman dengan penerbit dan penulis si “A” misalkan. Ternyata tidak ada, yang ada buku tentang independensi kekuasaan kehakiman yang ditulis oleh pengarang dan penerbit yang berbeda. Artinya kebutuhan itu bisa di cover dengan judul yang sama. Apabila buku yang dibutuhkan memang tidak ada, maka akan dilakukan pengadaan secara cepat, diluar pengadaan reguler. Terkadang kita juga bisa membeli buku sendiri.		lain yang masih berkaitan dengan informasi yang dicari.
3	<b>Informan:</b> Ali <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 27 April 2012 <b>Pukul:</b> 13.30-14.00	Pustakawan biasanya mengusulkan beberapa hal, misalnya buku itu bagus dan akan sering digunakan maka akan dilakukan pembelian atau penggandaan. Jika hakim yang meminta, akan langsung diadakan biasanya.	Pembelian atau pengadaan.	Pustakawan memberikan pilihan antara pembelian atau penggandaan koleksi yang dibutuhkan.
4	<b>Informan:</b> Dina <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-16.00	Jika subjeknya terlalu spesifik, saya memahami kendala yang ada di perpustakaan. Karena tidak semua pustakawan berlatar belakang pustakawan hukum. Peran tersebut akan kita ambil sendiri dengan tidak memaksa mereka mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Minimal mereka memberi informasi bahwa buku tersebut ada di suatu tempat.	Mencari informasi sendiri.	Pustakawan perlu meningkatkan kemampuan untuk lebih memahami informasi yang dibutuhkan peneliti.
5	<b>Informan:</b> Irfan <b>Tempat:</b> Ruang Hakim Kerja <b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-15.30	Jika bukunya tidak terdapat di perpustakaan, maka perpustakaan akan mengusahakan pengadaan buku tersebut. Berbeda halnya jika buku tersebut dibutuhkan oleh hakim, saat itu juga bisa diadakan.	Pengadaan buku.	Koleksi yang belum dimiliki perpustakaan akan dimasukkan kedalam daftar pengadaan selama tahun berjalan.
6	<b>Informan:</b> Dewi, Pustakawan. <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b>	Pertama kita terluhur di internet, biasanya kan di internet ada lokasinya lalu kita langsung telepon tempat koleksi itu berada. Peneliti kita kasih pilihan untuk pembelian atau penggandaan saja. Biasanya pembelian itu lebih cepat, kita kejar saja langsung ke penerbit	Pencarian di internet, pembelian atau penggandaan.	Perpustakaan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan informasi peneliti.

	3 Mei 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-14.35	atau distributornya. Kalo untuk hakim bisa kita adakan saat itu juga, tapi kalo buat peneliti ya mesti menunggu sampai pengadaan selanjutnya.		
--	---	---	--	--

8. Apakah peneliti sangat mengandalkan perpustakaan untuk mendapatkan informasi?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Sukri <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.50-14.40	Untuk mengandalkan sih tidak, kita juga mengerti proporsi masing-masing. Peneliti tidak hanya mengandalkan pada perpustakaan MK saja. Biasanya peneliti menyampaikan ke perpustakaan, sumber yang mereka cari, kalaupun tidak ada, maka peneliti akan mencarinya di luar perpustakaan. Kalau gak ada di perpustakaan, saya akan mengusulkan untuk membeli buku tersebut.	Perpustakaan tidak selalu menjadi yang utama	Perpustakaan harus berusaha mengetahui kebutuhan peneliti.
2	<b>Informan:</b> Nalom <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-15.00	Selama ini kita menggantungkan kebutuhan pada perpustakaan, jadi selain itu “second option” nya paling media online. Kita searching, tapi kalau untuk yang fisik kita selalu kembalinya kepada perpustakaan, buat saya “perpustakaan rumah kita”. Itu memang kenyataannya, karena kemana lagi selain ke perpustakaan.	Media online adalah second option.	Perpustakaan dijadikan tempat andalan untuk mendapatkan informasi. Sementara internet hanya dijadikan pilihan kedua dalam mendapatkan informasi.
3	<b>Informan:</b> Ali <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 27 April 2012 <b>Pukul:</b> 13.30-14.00	Bisa dibilang sangat mengandalkan, karena sumber primer kan berasal dari buku internet kan hanya sebatas penunjang saja. Terlebih dengan koleksi e-book yang dimiliki perpustakaan, walaupun kita tidak datang kesini, e-book kan juga menjadi salah satu layanan yang ada diperpustakaan ini. Perpustakaan juga merupakan tempat yang nyaman untuk melakukan diskusi.	Buku sebagai sumber primer.	Koleksi tercetak yang dimiliki perpustakaan diandalkan peneliti untuk memenuhi informasi mereka.
4	<b>Informan:</b> Dina <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Senin, 23	Sejauh ini, sepanjang berkaitan dengan tema-tema hukum dan konstitusi sangat diandalkan. Tetapi kita juga memahami jika ada hal-hal diluar dari itu ya otomatis ada andalan yang lain, seperti internet, google books, dll.	Masalah hukum, perpustakaan diandalkan	Perpustakaan harus lebih memperhatikan koleksi lain diluar subjek hukum.

	April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-16.00			
5	<b>Informan:</b> Irfan <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-15.30	Iya, perpustakaan itu ibaratnya “nafas”nya peneliti untuk menjalankan tugasnya. Karena internet itu kan hanya pendukung.	“nafas” peneliti	Perpustakaan menjadi andalan para peneliti untuk mendapatkan informasi.

9. Perlukah perpustakaan membuat produk informasi untuk menunjang kebutuhan informasi peneliti?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Nalom <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-15.00	Selama ini search engine yang dimiliki oleh perpustakaan online sudah cukup memadai, kita cukup menetik judul bukunya dan penerbitnya, kemudian kita bisa mengetahui ada berapa banyak buku yang tersedia atau tidak. Mungkin dengan mendigitalisasi semua buku, tetapi sepertinya hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena berkaitan dengan hak cipta juga.	Penelusuran online	Katalog online (OPAC) yang dimiliki perpustakaan sudah cukup lengkap memberikan informasi koleksi untuk peneliti.
2	<b>Informan:</b> Dina <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-16.00	Seperti abstraksi, menurut saya sangat penting sekali. Karena kadang-kadang untuk menelusuri satu referensi dan tahu isinya kita cuma baca abstraksinya. Untuk efisiensi waktu, biar gak <i>wasting time</i> aja. Paling tidak dari abstraksi itu kita sudah tahu representasi isi bukunya.	Abstraksi	Abstraksi dari suatu koleksi harus lebih menyeluruh dan mendalam.
3	<b>Informan:</b> Ali <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 27 April 2012	Sangat perlu. Bahkan mungkin dibutuhkan semacam katalog, karena kita belum mempunyai katalog yang secara khusus. Koleksi disini kan tersebar, perlu dibuat katalog yang lebih spesifik lagi. <i>In case</i> internet mati, kita masih punya hard copy nya untuk	Katalog yang lebih spesifik.	Perpustakaan yang memiliki koleksi khusus harus membuat katalog yang lebih spesifik untuk koleksinya.

	<b>Pukul:</b> 13.30-14.00	melihatnya. Klasifikasi per-subjek juga perlu.		
4	<b>Informan:</b> Irfan <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-15.30	Perlu sekali, walaupun diperpustakaan online nya sudah terdapat abstraksi, bagi saya masih kurang lengkap, karena ada beberapa informasi-informasi yang perlu kita perdalam lagi. Sehingga dibutuhkan abstraksi yang lebih mendalam. Tidak hanya sebatas luarnya saja.	Abstraksi	Saran peneliti untuk perpustakaan dalam hal memenuhi kebutuhan informasi mereka adalah abstraksi informatif.
5	<b>Informan:</b> Dewi, Pustakawan. <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 3 Mei 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-14.35	Menurut saya perlu, terkait dengan kemas informasi. Seperti kumpulan artikel tentang suatu perkara atau isu. Sebenarnya itu sangat perlu, tetapi sumber daya kita belum mampu melakukan hal tersebut. Kebutuhan akan hal itu juga belum begitu mendesak. Kami juga punya koleksi audio visual, tetapi belum diolah. Menurut saya abstraksi yang ada diperpustakaan online sudah mencukupi seperti nya.	Artikel (kliping) ttg perkara atau isu yang sedang berkembang.	Keterbatasan SDM menyebabkan layanan yang diberikan oleh perpustakaan kurang beragam. Walaupun layanan yang diinginkan tidak terlalu dibutuhkan.

10. Apakah koleksi-koleksi yang sudah dimiliki perpustakaan Mahkamah Konstitusi sudah mampu memenuhi kebutuhan pengguna?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Sukri <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.50-14.40	Sepanjang yang saya tahu sudah dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Perkembangan perkara yang dibawa ke MK selalu dinamis, ada juga isu-isu terbaru yang tentunya hal-hal yang membutuhkan banyak pendalaman atau literatur, dan perkembangan sesuai dengan beragamnya perkara yang dihadapi oleh MK, jadi perpus menyesuaikan juga dengan kebutuhan MK. Perpustakaan di MK harus mengikuti perkembangan perkara di MK. Untuk sekarang ini saya sudah merasa cukup memenuhi. Banyak juga koleksi yang diadakan untuk antisipasi perkara yang mungkin akan masuk ke MK.	Dapat memenuhi kebutuhan informasi.	Kebutuhan sudah sesuai, Perkara yang dinamis menuntut perpustakaan menyesuaikan koleksinya.
2	<b>Informan:</b>	Ya, sudah. Kalau menurut saya wujudnya apa? Dengan pengadaan buku-buku ini, yang lainnya	Sudah mencukupi.	Sudah, ada peran aktif dari peneliti

	<p>Nalom</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 14.00- 15.00</p>	<p>yaitu dengan mengundang provider-provider yang melakukan audiensi tentang media online, kemudian tentang pembelian e-book, kemudian peneliti dilibatkan didalamnya, kita akhirnya bisa memberikan peran aktif terhadap kegiatan yang dilangsungkan oleh perpustakaan. Disitulah bentuk kerja sama dan wujud dari upaya-upaya memenuhi kelengkapan informasi yang ada di perpustakaan.</p>		<p>dalam hal pengembangan koleksi.</p>
3	<p><b>Informan:</b> Ali</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> 27 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 13.30- 14.00</p>	<p>Sejauh ini mungkin bisa dikatakan cukup, tetapi masih perlu ditambah. Cukup dalam artian sudah cukup banyak koleksinya tetapi masih harus ditambah dalam hal yang terkait dengan buku-buku yang sering dipakai dipersidangan. Karena perkara kita berkembang dari waktu ke waktu jadi setiap tahun dibutuhkan buku-buku baru. Perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin maju. Subjek yang tidak terkait dengan hukum juga perlu, karena perkara yang ditangani MK sangat luas.</p>	Cukup.	<p>Koleksi yang sudah ada harus ditambah, terutama yang menyangkut persidangan. Selain subjek hukum, koleksi yang ada juga perlu dikembangkan.</p>
4	<p><b>Informan:</b> Dina</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Senin, 23 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.00- 16.00</p>	<p>Kalau saya pribadi sudah sangat membantu. Karena mau tidak mau kita akan selalu berkaitan dengan yang namanya referensi atau sumber yang ada kaitannya dengan tugas-tugas atau mensupport tugas hakim. Walaupun ada beberapa subjek yang belum terlalu spesifik mengupasnya. Misalnya saya mencari tentang pemilukada, sepanjang pemilukada tersebut terkait dengan putusan konstitusi itu pasti ada. Tetapi, jika saya menginginkan informasi tentang sejarah pilkada dari zaman dahulu, itu tidak ada disini.</p>	Sangat membantu.	<p>Koleksi yang ada di perpustakaan mengenai subjek tertentu harus ada pembahasannya secara total dan mendalam.</p>
5	<p><b>Informan:</b> Irfan</p> <p><b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim</p> <p><b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.00- 15.30</p>	<p>Masih ada yang kurang tentunya, jadi masih ada yang kita butuhkan itu tidak tersedia di perpustakaan. Pengadaan di perpustakaan itu perlu ditingkatkan. Untuk pengembangan koleksi terutama ilmu hukum. Ilmu hukum kan bersifat dinamis, sehingga perpustakaan perlu mengikuti perkembangan, jangan sampai menggunakan informasi yang kadaluarsa sehingga koleksi perpustakaan harus terus diperbaharui. Selain itu, subjek-subjek lain juga perlu.</p>	Masih kurang.	<p>Perpustakaan masih harus meningkatkan pengembangan koleksi, terutama untuk koleksi diluar subjek hukum.</p>
6	<p><b>Informan:</b> Dewi, Pustakawan.</p>	<p>Terkait dengan peran perpustakaan sendiri, selama ini sudah cukup, karena koleksi-koleksi disini sudah banyak dipakai. Peranan</p>	Cukup.	<p>Perpustakaan harus semakin aktif melakukan survey</p>

	<b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 3 Mei 2012 <b>Pukul:</b> 14.00-14.35	perpustakaan dilembaga ini sudah cukup mendukung. Setiap hari ada saja permintaan buku dan peminjaman.	mengenai ilmu hukum yang semakin berkembang, selain itu juga mengenai perkembangan ilmu lainnya.
--	---	--	--

11. Adakah kebijakan tertulis yang menjadikan latar belakang perpustakaan ini hanya diperuntukkan bagi peneliti saja?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Kata Kunci	Interpretasi
1	<b>Informan:</b> Irfan <b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim <b>Waktu:</b> Kamis, 26 April 2012 <b>Pukul:</b> 15.00-15.30	Setahu saya memang cita-cita idealnya perpustakaan ini sebagai rujukan atau referensi dan menuju tempat referensi konstitusi terlengkap. Artinya, perpustakaan ini tidak hanya untuk hakim atau seluruh keluarga besar MK, tetapi untuk seluruh masyarakat luas, siapa pun ingin akses ilmu pengetahuan atau buku. Perpustakaan ini terbuka untuk umum, hanya saja koleksinya tidak bisa dipinjam oleh masyarakat umum. Selama saya disini tidak ada kebijakan tertulis yang mengatakan perpustakaan hanya untuk hakim atau pegawai MK saja. Malahan hakim menginginkan perpustakaan ini ramai dikunjungi masyarakat luas.	Referensi konstitusi terlengkap	Awal berdirinya perpustakaan MK dimaksudkan untuk mendukung referensi hakim dalam membuat keputusan. Cita-cita perpustakaan MK adalah menjadi tempat referensi konstitusi terlengkap di Indonesia.
2	<b>Informan:</b> Hanindyo, Supervisor Perpustakaan <b>Tempat:</b> Perpustakaan MK <b>Waktu:</b> 30 April 2012 <b>Pukul:</b> 14.30-15.00	Tidak usah ada kebijakan tertulis, karena setiap perpustakaan khusus sudah otomatis harus mendukung core bussiness institusinya. Ketika MK berdiri dan didalamnya terdapat perpustakaan, itu sudah otomatis menjadi <i>supporting system</i> institusi MK. Kalo sudah menjadi <i>supporting system</i> nya MK ya berarti sudah menjadi <i>supporting</i> nya hakim. Periode awal MK berdiri pada periode 2003-2008, perpustakaan menjadi besar ketika periode awal MK berdiri. Hakim yang saat itu menjabat sangat concern untuk membuat perpustakaan menjadi besar, perhatiannya sangat besar. Bahkan perpustakaan dijadikan salah satu prioritas untuk pengembangan perpustakaan. Dari periode awal sudah ada hal tersebut, dan	<i>Supporting system</i> badan induknya.	Mahkamah Konstitusi sangat memperhatikan keberadaan perpustakaan untuk menunjang peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang mampu menyelesaikan sengketa pilkada, pengujian undang-undang, dan lain sebagainya.

	masuk anggaran MK. Sampai tahun 2008 perpustakaan menjadi program prioritas, karena kebutuhan informasi pengguna sangat besar. Sampai sekarang, peraturan itu juga tidak pernah berubah. Tidak hanya hakim dan pegawai MK yang bisa menggunakan koleksi di perpustakaan, tetapi seluruh masyarakat bisa menggunakannya. Karena aturan tersebut sudah tertuang di peraturan awal. Itu lah sebabnya setiap pameran yang kita ikuti harus mempromosikan penggunaan perpustakaan.	
--	---	--

12. Apakah hakim konstitusi pernah mengunjungi perpustakaan Mahkamah Konstitusi?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara	Interpretasi
1	<p><b>Informan:</b> Sukri</p> <p><b>Tempat:</b> Ruang Kerja Hakim</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 15.50-14.40</p>	<p>Jarang, hampir tidak pernah, mungkin hanya satu atau dua kali dalam setahun, itu karena keterbatasan waktu yang mereka miliki. Mungkin beliau akan meminta kepada peneliti, atau seandainya Hakim ingin mendalami suatu perkara, sudah punya ruangan sendiri, sehingga tidak perlu datang ke perpustakaan.</p>	
2	<p><b>Informan:</b> Nalom</p> <p><b>Tempat:</b> Perpustakaan MK</p> <p><b>Waktu:</b> Jumat, 20 April 2012</p> <p><b>Pukul:</b> 14.00-15.00</p>	<p>Karena hakim itu kan jadwal sidangnya amat sangat padat, beliau-beliau itu memang tidak punya kewajiban sama sekali terhadap pengadaan buku-buku di perpustakaan. Karena perpustakaan berada di bawah Sekretariat Jenderal. Hakim hanya menggunakannya saja. Peneliti bertugas memfilter apakah informasi ini cukup layak untuk kita sampaikan/referensinya sudah cukup untuk disajikan. Ini sudah cukup akurat. Jadi amat sangat jarang Hakim, tapi ketika Hakim sedang membutuhkan sumber, akan meminta kepada peneliti. Itu pernah terjadi, bahkan beberapa kali.</p>	